KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kami dalam melaksanakan amanah pembangunan daerah sesuai dengan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Penyusunan dokumen LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja yang telah diraih selama tahun 2025 oleh seluruh perangkat daerah, termasuk program-program prioritas yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, laporan ini juga memuat berbagai tantangan yang dihadapi serta transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang tercapai tidak terlepas dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari internal pemerintah daerah maupun dukungan masyarakat serta mitra kerja lainnya. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian target target pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara sepanjang tahun 2025.

Kami berharap dokumen LKjIP ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan sekaligus menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Kritik

dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kwandang, 7 April 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU..... ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR GAMBAR..... v
DAFTAR TABEL..... vii
DAFTAR GRAFIK..... x
IKHTISAR EKSEKUTIF xii
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang..... 1
Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara..... 1
Letak Wilayah Geografis..... 1
Luas Wilayah.....
Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... 2
Sumber Daya Aparatur..... 3
Sumber Daya Keuangan..... 5
Isu Strategis..... 23
Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah..... 26
Kedudukan..... 26
Tugas Pokok..... 26
1.2.3 Fugsi..... 26
1.2.4 Perangkat Daerah..... 26
1.3 Sistematika Penyajian 30
BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 31
2.1 Perencanaan Strategis Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026..... 31
2.2 Tujuan dan Sasaran..... 34
2.3 Indikator Kinerja Utama..... 40

2.4 Rencana Kinerja Tahunan…… 41
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025…… 45
BAB III AKUNTABILTAS KINERJA…… 49
3.1 Pengukuran Kinerja…… 49
3.2 Analis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025…… 54
3.2.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Stabilitas Daerah. …… 54
3.2.2 Sasaran Strategis 2 Memulihkan ekosistem dan Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim. …… 57
3.2.3 Sasaran 3 Pemenuhan Infrastruktur strategis dan Fasilitas Layanan dasar Publik…… 62
3.2.4 Sasaran Strategis 4. Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah. …… 63
3.2.5 Sasaran Stategis 5. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Agalitas Tenaga Kerja …… 70
3.2.6 Sasaran Stategis 6. Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Perlindungan Sosial…… 73
3.2.7 Sasaran Strategis 7. Menguatnya Daya Saing Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan…… 85
3.2.8 Sasaran Strategis 8. Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi…… 90
3.2.9 Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat…… 99
3.2.10 Sasaran Strategis 10. Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak. …… 107
3.2.11 Strategis 11. Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya…… 112
Sasaran 12. Keuangan Daerah terkelola secara sehat dan

akuntable……..……. 116
3.2.13 Sasaran Strategis 13. Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik……..…… 122
3.2.14 Sasaran Strategis 14. Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah…….. 127
3.2.15 Sasaran Strategis 15. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik……..…….. 130
3.2.16 Sasaran Strategis 16. Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur……..…….. 135
BAB IV. PENUTUP……..……. 138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Rumus Perhitungan IKLH……..58
Gambar 3.3 Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Penanaman Pohon ……..60
Gambar 3.4 Musyawarah penyertaan modal BUMDESS Tahun 2025…….67
Gambar 3.5 Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi 72
Gambar 3.6 Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di beberapa desa di Kabupaten Gorontalo Utara……..78
Gambar 3.7 Penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako dan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat kurang mampu……..…….78
Gambar 3.8 Aktivitas nelayan di wilayah pesisir seperti Gentuma dan Ponelo Kepulauan……..…….81
Gambar 3.9 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2025…….....87
Gambar 3.10 Kegiatan pengawasan kelaikan jalan (KIUR)……..…….89
Gambar 3.11 Pengadaan Alat Pembelajaran PAUD/TK dan Kesiapan satuan pendidikan PAUD ……....96
Gambar 3.12 Bantuan beasiswa bagi pendidikdan Pengadaan marching band paud/TK.....96
Gambar 3.13 Sekolah Kesetaraan Paket A/B/C Tahun 2025……97
Gambar 3.14 Bupati Thariq Kukuhkan Bunda Literasi, Gerakan Semangat Membaca di Gorut.....97
Gambar 3.16 Pemeriksaan Ibu hamil yang bermasalah gizi.....101
Gambar 3.17 Pelayanan kesehatan bayi b aru lahir.....101
Gambar 3.18 Bupati Thariq Kukuhkan TP Posyandu 2025-2030.....102
Gambar 3.19 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir……..……104
Gambar 3.20 Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Gorontalo Utara……110

Gambar 3.21 DPPPA Provinsi Dan Pemkab Gorontalo Utara Berkolaborasi Gelar Sosialisasi Pencegahan TPPO Dan Perkawinan Anak, Dirangkaikan Dengan Deklarasi DRPPA Dan Gerak .SKS……..111
Gambar 3.22 Kabupaten Gorontalo Utara Kembali Raih Predikat WTP dari BPK Provinsi Gorontalo……117
Gambar 3.23 Sosialisasi pemanfaatan jalan dan Perda Retribusi parkir di Kabupaten Gorontalo Utara……..……121
Gambar 3.24 LHE Indeks SPBE Kabupaten Gorontalo Utara……..……..125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan……	4
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4
Tabel 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan……	5
Tabel 1.4	APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025……	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.....	35
Tabel 2.2	Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, Indikator dan Target 2024-2026……	37
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025……	41
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025……..	43
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja……	50
Tabel 3.2	Rekapitulasi Capaian Tujuan dan Sasaran……...	50
Tabel 3.3	Rekapitulasi Capaian IKU……	53
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1……	55
Tabel 3.5	Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2025……	57
Tabel 3.6	Tabel Efisiensi sasaran 1……...	57
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Sasaran 2……	58
Tabel 3.8	Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup……	59
Tabel 3.9	Tabel Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2025……	61
Tabel 3.10	Tabel Efisiensi sasaran 2……...	62
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Sasaran 3……	63
Tabel 3.12	Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah……	63
Tabel 3.13	Tabel Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2025……	68
Tabel 3.14	Tabel Efisiensi sasaran 4……...	69
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan kerja dan Agalitas Tenaga Kerja……...	71
Tabel 3.16	Tabel Program dan Anggaran sasaran 5……	73

Tabel 3.17	Tabel Efisiensi sasaran 5……..	73
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial……	75
Tabel 3.19	Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2025……	83
Tabel 3. 20	Tabel Efisiensi sasaran 6……	84
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi Pembangunan……..	85
Tabel 3.22	Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2025……	89
Tabel 3.23	Tabel Efisiensi sasaran 7……..	90
Tabel 3.24	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi……..	91
Tabel 3.25	Program dan Anggaran 8 Tahun 2025……	97
Tabel 3.26	Tabel Efisiensi sasaran 8……..	98
Tabel 3.27	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat……	99
Tabel 3.28	Program dan anggaran Sasaran 9 Tahun 2025……	106
Tabel 3.29	Tabel Efisiensi sasaran 9……	107
Tabel 3.30	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya pembangunan untu kesetaraan gender dan perlindungan anak……	108
Tabel 3.31	Program dan anggaran Sasaran 10 Tahun 2025……	111
Tabel 3.32	Tabel Efisiensi sasaran 10……	112
Tabel 3.33	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya……..	113
Tabel 3.34	Program dan Anggaran Sasaran 11……	114
Tabel 3.35	Tabel Efisiensi sasaran 11……	115
Tabel 3.36	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel……	116
Tabel 3.37	Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2025……	122

Tabel 3.38	Tabel Efisiensi sasaran 12……	122
Tabel 3.39	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik……..	123
Tabel 3.40	Program dan anggaran Sasaran 13 Tahun 2025……..	126
Tabel 3.41	Tabel Efisiensi sasaran 13……	126
Tabel 3.42	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah……	127
Tabel 3.43	Program dan anggaran Sasaran 13 Tahun 2025……..	130
Tabel 3.44	Tabel Efisiensi sasaran 14……	130
Tabel 3.45	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik……..	131
Tabel 3.46	Program dan anggaran Sasaran 15 Tahun 2025…….	133
Tabel 3.47	Tabel Efisiensi sasaran 15……	134
Tabel 3.48	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya daya, profesion alisme, dan iklim kerja aparatur…….	135
Tabel 3.49	Program dan anggaran Sasaran 16 Tahun 2025…….	137
Tabel 3.50	Tabel Efisiensi sasaran 16……	137

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021-2025……	58
Grafik 3.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021-2025…….	59
Grafik 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023-2025……	60
Grafik 3.4	Persentase Status desa Mandiri Tahun 2023-2025……..	66
Grafik 3.5	Rekapitulasi Capaian IKU……	68
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Tingkat Penagguran Terbuka Tahun 2023-2025…….	72
Grafik 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin……..	76
Grafik 3.8	Perbandingan Persentase Kemiskinan se-Provinsi Gorontalo Tahun 2025……	76
Grafik 3.9	Perbandingan Persentase kemiskinan dengan Capaian nasional dan Provinsi Gorontalo…….	77
Grafik 3. 10	Target dan Realisasi pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan Tahun 2025……	79
Grafik 3.11	Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo…..	79
Grafik 3.12	Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025……	82
Grafik 3.13	Indeks Ketahanan Pangan Nasional dan provinsi Gorontalo…….	82
Grafik 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Dimensi Pendidikan Tahun 2024-2025…….	93
Grafik 3.15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2025…….	94
Grafik 3.16	Prevalensi Stunting Tahun 2021-2025.....	102
Grafik 3.17	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi gorontalo……	104
Grafik 3.18	Perbandingan IPG Se Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	109
Grafik 3.19	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam dari tahun 2023	

	sampai 2025.....	114
Grafik 3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2025….	124
Grafik 3.21	Nilai SAKIP Kab.Gorontalo Utara Tahun 2020-2025……	129
Grafik 3.22	Nilai SPIP Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023-2025……..	130
Grafik 3.23	Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)……..	131
Grafik 3.24	IKM Gorontalo Utara Tahun 2023-2025……..	132

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gorontalo Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Gorontalo Utara terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berorientasi pada hasil.

Laporan ini menginformasikan capaian kinerja (performance result) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025. Semua program yang dilaksanakan sudah mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada arah kebijakan Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPD 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari RPD 2024-2026. LAKIP ini disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian kinerja 26 (dua puluh enam) indikator kinerja Kabupaten Gorontalo Utara yang dicapai dalam 16 (enam belas) sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Indikator dengan persentase capaian kinerja 91-100% atau lebih dan berkategori sangat tinggi berjumlah 17 indikator.
- Indikator dengan persentase capaian kinerja 76-90% dan berkategori tinggi berjumlah 3 indikator.
- Indikator dengan persentase capaian kinerja 66-75% dan berkategori sedang berjumlah 1 indikator.
- Indikator dengan persentase capaian kinerja 51-65% dan berkategori rendah berjumlah 1 indikator.
- Indikator dengan persentase capaian kinerja dibawah 50% dan berkategori sangat rendah berjumlah 2 indikator
- Dan 2 Indikator tidak bisa di ukur karena belum tersedianya data realisasi.

Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,25	204,52	65,64
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70	79,59	114
3	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Persen	73	N/A	-
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	4,17	87,79
5	Persentase status “Desa Mandiri”	Persen	13,82	44,44	321
6	PDRB per kapita	Ribuan Rupiah	19,657	19,79	100,7
7	Tingkat penganggur an terbuka	Persen	2,1	3,05	69
8	Persentase penduduk miskin	Persen	16,25	15,89	102
9	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Ribuan Rupiah	10,580	10,678	100,9
10	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80	66,59	83,23
11	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	4,25	N/A	-
12	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	2,85	3,40	119
13	Indeks Dimensi Pendidikan	Poin	9,831	9,95(2024)	101
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	74,1	0,74	0,99

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
15	Prevalensi stunting	Persen	29,1	12,52	232
16	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,6	70,25	105
17	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,26	82.43*)	101
18	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	100
19	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	Kejadian	330	2	0,60
20	Opini laporan keuangan daerah	Poin	WTP	WTP	100
21	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	5	7,02	140
22	Indeks Maturitas SPBE	Poin	1,75	3,16	180
23	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	67	64,14	95,73
24	Maturitas SPIP	Level	2,9	2,9	100
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,95	3,46	87,59
26	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	36,1	80,65	223

Pencapaian kinerja sasaran yang telah dicapai merupakan rata-rata dari berbagai indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran belum mencapai target kinerja karena adanya hambatan dan kendala tertentu. Oleh karena itu, kami telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mendatang dapat mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi publik. Kami juga selalu terbuka terhadap masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di masa depan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

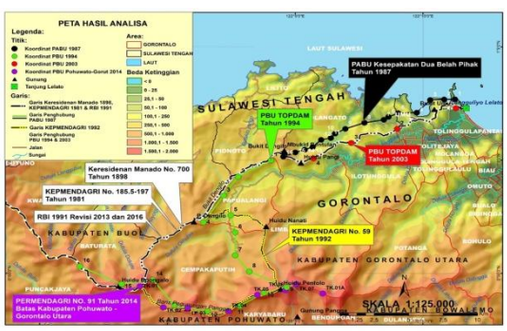
Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan

Adapun pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2025, akan disajikan dalam buku ini.

1.2. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara

1.2.1. Letak Wilayah Geografis



Kabupaten Gorontalo Utara adalah Kabupaten terbungsu di Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 diresmikan pada tanggal 26 April 2007 yang terdiri 5 Kecamatan yaitu Atinggola, Kwandang, Anggrek, Sumalata dan Tolinggula, selang beberapa tahun kemudian kondisi adminisitrasi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara mengalami perubahan dengan pemekaran sejumlah kecamatan dan desa sehingga pada saat ini telah menjadi 11 kecamatan dengan 123 Desa. Wilayahnya terdiri dari daratan yang sebagian besarnya adalah wilayah perbukitan rendah, dan dataran tinggi yang mencapai 0 – 1800 Meter Diatas Permukaan Laut serta didominasi oleh kemiringan 150 – 400 (60 persen-70 persen).

Kabupaten Gorontalo Utara terletak memanjang dari arah timur ke barat di bagian utara Provinsi Gorontalo, sepanjang jalur jalan Trans-Sulawesi bagian utara, yang menghubungkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah, dan terletak pada 386.732 mT – 530.446 mT dan 74.367 mU – 115.085 mU (zone UTM 51 North).

1.2.2. Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Gorontalo Utara terletak pada 00^{0}41’23” – 1º07’55” LU dan 121º58‘59“- 123º16‘29“BT. Lebih dari 75 persen wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai mencapai 317,39 Km. Perairan di daerah ini termasuk dalam perairan Laut Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, serta termasuk dalam Wilayah Pengembangan Perikanan (WPP).

Secara geografis letak Kabupaten Gorontalo Utara memiliki batas-batas administratif dengan beberapa wilayah lainnya, yakni sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Sulawesi
- Sebelah barat : Kabupaten Buol dan Pohuwato
- Sebelah selatan : Kabupaten Gorontalo dan Boalemo
- Sebelah timur : Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bone Bolango

1.2.3. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dengan nomenklatur sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi :
   1) Pendidikan
   2) Kesehatan
   3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6) Sosial

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi :
1) Tenaga Kerja
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3) Pangan
4) Pertanahan
5) Lingkungan Hidup
6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7) Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9) Perhubungan
10) Komunikasi dan Informatika
11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12) Penanaman Modal
13) Kepemudaan dan Olahraga
14) Statistik
15) Kebudayaan
16) Perpustakaan
17) Kearsipan

c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
1) Kelautan dan Perikanan
2) Pariwisata
3) Pertanian
4) Perdagangan
5) Perindustrian

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi :
1) Administrasi Pemerintahan
2) Pengawasan
3) Perencanaan
4) Keuangan
5) Kepegawaian
6) Penelitian dan Pengembangan
7) Sekretariat DPRD
8) Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan
9) Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2.4. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang ditempatkan pada Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 sebanyak 3.601 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempaun	Jumlah	Proporsi (%)
S3	1	1	2	0,04
S2	11	16	27	0,57
S-1/Sarjana	981	2.596	3.577	75,50
Diploma IV	1	10	11	0,23
Diploma III	80	373	453	9,56
Diploma II	2	0	2	0,04
Diploma I	1	0	1	0,02
SLTA	289	373	662	13,97
SLTP	2	1	3	0,06
Total	**1.368**	**3.370**	**4.738**	**100,00**

2. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Golongan	Laki-Laki	Perempaun	Jumlah	Proporsi (%)
I	1	0	1	0,05
II	48	67	115	5,43
III	528	1.076	1.604	75,70
IV	165	234	399	18,83
Total	**742**	**1.377**	**2.119**	**100,00**

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Golongan	Laki-Laki	Perempaun	Jumlah	Proporsi (%)
V	54	21	75	2,86
VII	29	211	240	9,16
IX	256	1.016	1.272	48,57
NON GOL (PPPK PARUH WAKTU)	287	745	1.032	39,40
Total	**626**	**1.993**	**2.619**	**100,00**

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempaun	Jumlah	Proporsi (%)
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	25	7	32	0,68
Administrator	76	43	119	2,51
Pengawas	75	84	159	3,36
Jabatan Fungsional Guru	399	1.431	1.830	38,62
Jabatan Fungsional Medis	115	659	774	16,34
Jabatan Fungsional Teknis	157	210	367	7,75
Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	516	941	1.457	30,75
Total	**1.363**	**3.375**	**4.738**	**100,00**

1.1.5 Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Tahun 2025 Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : Nomor 29 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**48.327.913.431,00**
4.1.01	Pajak Daerah	18.216.566.661,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	202.088.596,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	202.088.596,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	202.088.596,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	20.250.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	20.250.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	20.250.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	862.500.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	862.500.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	862.500.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.293.483.502,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.293.483.502,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.293.483.502,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	111.562.500,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	111.562.500,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	111.562.500,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.772.479.211,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	900.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	900.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	4.714.229.211,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	4.714.229.211,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	155.250.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	155.250.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.943.640.865,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	4.943.640.865,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	4.943.640.865,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.010.561.987,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	5.010.561.987,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-08 08:30:39 Halaman 1

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	5.010.561.987,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.856.346.770,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	735.880.280,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	125.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	125.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	101.220.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	101.220.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	370.860.280,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	313.933.790,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	51.926.490,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	5.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	28.800.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	28.800.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	720.466.490,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	199.380.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	115.200.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	84.180.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	51.926.490,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	51.926.490,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.240.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30.240.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	150.120.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	150.120.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	263.800.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	263.800.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.255.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500.000.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	750.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.000.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.900.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.900.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	2.500.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.500.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.250.000,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.250.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	18.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.560.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.560.000.000,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	390.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	390.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	50.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	50.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**746.016.702.384,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	731.469.524.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	91.709.286.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.05.01	Dana Desa	91.709.286.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	91.709.286.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.397.245.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.397.245.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.397.245.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.130.090.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	4.508.325.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.685.356.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.822.969.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.880.865.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	25.233.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	305.925.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.549.707.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	740.900.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	740.900.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	421.201.980.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	318.716.921.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	318.716.921.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	102.485.059.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.295.703.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.124.215.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	24.823.304.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.241.837.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	204.030.923.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	101.723.175.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	749.935.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	715.063.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	414.680.000,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	25.614.956.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.674.063.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	40.437.564.000,00
4.2.01.09.01.0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	20.322.914.000,00
4.2.01.09.01.0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	7.794.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	102.307.748.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.656.940.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.234.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.050.686.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	722.000.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.225.773.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.883.644.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.095.100.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.188.489.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	255.624.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.272.300.000,00
4.2.01.09.02.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.321.782.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.547.178.384,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	14.547.178.384,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.547.178.384,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.267.178.384,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	25.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.255.000.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**9.780.657.941,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.780.657.941,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.780.657.941,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.780.657.941,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.780.657.941,00
	Jumlah Pendapatan	**804.125.273.756,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**535.617.002.808,79**
5.1.01	Belanja Pegawai	350.242.511.533,30
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	247.432.060.184,34
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	190.274.729.330,12
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	122.607.952.468,96
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	67.666.776.861,16
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.390.346.598,92
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.497.306.238,04
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.893.040.360,88
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.741.481.388,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.741.481.388,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.347.801.251,48
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.347.801.251,48
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.533.333.834,96

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	935.868.276,98
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.597.465.557,98
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.203.699.787,96
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.659.205.640,92
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.544.494.147,04
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	252.036.165,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	252.036.165,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.906.044,62
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.683.802,46
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.222.242,16
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.164.305.494,40
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.721.377.777,34
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.442.927.717,06
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	380.354.149,34
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	251.581.928,30
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	128.772.221,04
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.141.066.139,54
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	754.763.038,74
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	386.303.100,80
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	91.112.156.776,96
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.386.400.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.386.400.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20.258.102.974,96
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	20.258.102.974,96
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.467.653.802,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	300.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	64.253.050.020,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.225.773.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	722.000.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.966.830.782,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.665.310.785,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.175.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.175.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.293.950,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.293.950,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.563.254,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.563.254,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	368.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	368.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.309.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.160.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.149.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.312.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.069.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.069.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	43.084.081,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	43.084.081,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	167.310.262,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	49.599.998,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	49.599.998,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.528.998,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.528.998,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.794.072,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.794.072,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	914,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	914,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.700.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.700.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	285.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	285.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	850.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	850.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	405.673.525,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	112.800.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	112.800.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	292.873.525,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	292.873.525,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	460.000.000,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	460.000.000,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	460.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.921.379.450,49
5.1.02.01	Belanja Barang	34.007.467.510,87
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.994.191.010,87
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	199.266.558,86
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.436.258,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.602.291.488,86
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	82.420.825,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.823.422,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	399.777.199,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	282.609.971,20
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.564.530.874,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	814.333.265,66
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	621.931.228,16
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.434.632.637,22
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	65.362.800,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.341.481,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	116.565.276,80
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	46.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	216.807.819,95
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.620.148.911,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	93.214.140,40

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.880.877.364,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.788.800.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	18.500.250,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	812.430.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.364.115.568,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.461.265.860,76
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	27.720.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	95.212.556,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	306.750.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	193.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	65.216.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	1.252.875,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	4.456.380,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	153.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	90.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	281.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.276.500,00
5.1.02.01.04.0583	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	13.276.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	67.419.353.164,20
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.625.513.489,90
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	53.040.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	684.319.275,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	457.324.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	421.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	217.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.497.900.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.066.850.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.760.084.741,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	102.600.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	732.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	118.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	11.400.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	149.400.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	94.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.705.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	262.900.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.067.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.916.220.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.868.493.400,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	653.300.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.982.850.300,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	13.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	75.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.351.587.466,20
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	163.238.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	495.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	670.535.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	207.847.397,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.647.826.561,50
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	53.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.654.895.955,20
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	15.345.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	200.297.500,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	728.563.894,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	277.075.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	65.880.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.784.360.949,40
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.780.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.000.000.949,40
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	500.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	300.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	204.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.907.015.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.106.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	378.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	423.015.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.135.805.519,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	961.905.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	35.169.039,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	78.731.480,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	132.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	132.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.754.420.851,90
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.058.117.687,90
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	690.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.006.303.164,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	80.237.354,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	80.237.354,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.155.831.309,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	896.713.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	603.214.500,00
5.1.02.03.02.0042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	20.244.000,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.500.000,00
5.1.02.03.02.0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	19.520.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	166.843.500,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	79.391.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.212.117.809,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.937.117.809,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	225.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.000.000,00
5.1.02.03.04.0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	7.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.212.153.632,42
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.212.153.632,42
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.679.644.107,42

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	142.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.390.009.525,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.209.100.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.672.100.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.362.100.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	310.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	537.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	537.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	17.595.113.504,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	16.109.013.504,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	14.874.263.504,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.234.750.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.222.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.222.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	264.100.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	219.100.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.212.163.330,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.212.163.330,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.212.163.330,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.110.197.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.110.197.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.110.197.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.796.600.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.796.600.000,00
5.1.03.04.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	6.796.600.000,00
5.1.03.04.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	6.796.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.656.511.825,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.937.644.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.067.644.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.067.644.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	270.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	270.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	718.867.825,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	718.867.825,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	718.867.825,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.000.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.000.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.000.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**128.350.171.066,65**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	280.338.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	280.338.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	280.338.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	280.338.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.171.395.127,06
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.192.874.760,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.192.874.760,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.878.260,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	1.627.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.559.996.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.768.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.768.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.000.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	768.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3.817.248,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.817.248,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.817.248,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.169.728.378,51
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	498.358.323,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	124.860.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	373.498.323,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.626.729.470,51
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.006.615.818,10
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	396.378.706,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	67.983.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	152.822.186,41

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.929.760,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.640.585,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	16.230.240,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	23.514.345,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.896.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	229.674.762,46
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	229.674.762,46
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	179.674.762,46
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	50.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.047.818.130,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.036.720.530,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	19.703.870,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	150.999.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.937.600,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	165.553.500,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.685.000.000,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	328.661.800,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	1.673.830.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	10.034.760,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.097.600,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.097.600,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.005.752.065,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	216.215,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	216.215,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7.005.535.850,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.200.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.287.500.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.518.035.850,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.322.343.397,09
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.631.620.075,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.631.620.075,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	690.723.322,09
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	307.857.322,09
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	382.866.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.141.583.386,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.141.583.386,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.141.583.386,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.289.803.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.289.803.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.289.803.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.748.552.814,59
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.443.552.814,59
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.205.262.814,59
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.799.143.876,27
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	444.400.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.748.603.325,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	450.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	348.115.613,32
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	415.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	238.290.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	238.290.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	705.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	705.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	705.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.015.865.365,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	62.829.805.340,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	62.237.085.340,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.187.085.340,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	50.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	592.720.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	592.720.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.645.359.850,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.620.359.850,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	100.000.000,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	5.520.359.850,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	25.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.540.700.175,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	819.400.175,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	819.400.175,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.700.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.700.000.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	21.300.000,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	21.300.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	697.816.610,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	697.816.610,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	697.816.610,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	697.816.610,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.436.203.150,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.436.203.150,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.436.203.150,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	675.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	761.203.150,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**137.232.860.780,25**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.007.291.343,10
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.821.656.666,10
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.821.656.666,10
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.821.656.666,10
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	185.634.677,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	185.634.677,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	185.634.677,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	135.225.569.437,15
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	597.252.171,15
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	597.252.171,15
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	597.252.171,15
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.628.317.266,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.628.317.266,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	134.628.317.266,00
	Jumlah Belanja	**803.200.034.655,69**
	Total Surplus/(Defisit)	**925.239.100,31**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**18.930.960.899,69**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.930.960.899,69
6.1.01.05	Penghematan Belanja	18.930.960.899,69
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	18.930.960.899,69
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	18.930.960.899,69
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**19.856.200.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1.500.000.000,00
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	1.500.000.000,00
6.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	18.356.200.000,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.356.200.000,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.356.200.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**19.856.200.000,00**
	Pembiayaan Netto	**-925.239.100,31**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gorontalo Utara, 31 Desember 2024

Pj Bupati

SILA N. BOTUTIHE

1.1.6 Isu Strategis

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan jangka menegah Kabupaten Gorontalo Utara, yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 yaitu :

- Ketahanan Bencana;

  Rentannya Kabupaten Gorontalo Utara terhadap bencana banjir dan tanah longsor berkaitan erat dengan kontur tanah dan topografi lahan yang memiliki tingkat kemiringan 150–400 sebanyak 60 persen-70 persen dan 35 aliran DAS yang tersebar dari barat ke timur. Laju deforestasi dan alih fungsi lahan yang tinggi di lereng-lereng bukit dan gunung erat kaitannya dengan fungsi pengaturan dan resapan air yang telah jauh berkurang. Kondisi tersebut diperumit oleh kebiasaan masyarakat untuk bercocok tanam di kemiringan lahan diatas 15 derajat dan pembangunan permukiman di sepanjang bibir sungai yang mengganggu laju air dari hulu ke hilir. Untuk itu perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan terkait skema pengelolaan sumber daya air (khususnya permukaan) secara menyeluruh.
  Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, proteksi limpasan air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

- Pemenuhan infrastruktur dasar dan strategis;

  Isu strategis infrastruktur wilayah di Gorontalo Utara adalah belum optimalnya peningkatan atau penyediaan infrastruktur utama jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Jalan dan jembatan yang baik belum mencapai 100 persen, hal yang tentu menghambat mobilitas penduduk dan konektivitas wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya usaha pembangunan maka akan meningkat pula tuntutan peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Selain peningkatan jalan yang saat ini sudah terbangun, pengembangan

konektivitas harus juga menyentuh kawasan perbatasan. Berdasarkan analisa, beberapa area perbatasan masih membutuhkan intervensi pembangunan jalan, seperti area Cempaka Putih-Taluditi-Marisa 4 di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Pohuwato dengan panjang 91 Km yang berfungsi selain untuk pengembangan ekonomi, juga untuk mendukung peningkatan layanan dasar dari tersedianya Rumah Sakit Pratama di Tolinggula. Selain itu, ketidaktersediaan terminal, baik penumpang maupun barang, di pusat-pusat ekonomi masyarakat menjadikan sistem transportasi tidak teratur, karena menaikturunkan penumpang dan barang di sembarang tempat.

Ketersediaan infrastruktur yang membantu perekonomian masyarakat juga masih terbatas. Beberapa contohnya adalah terbatasnya infrastruktur pertanian, perikanan, dan peternakan berupa bangunan Balai Penyuluh Pertanian, Rumah Potong Hewan (RPH) yang hanya tersedia satu unit kelas “D” di Desa Putiana Kecamatan Anggrek, *long storage,* air irigasi, dan jalan usaha tani. Infrastruktur irigasi juga banyak yang sudah tidak berfungsi sehingga hasil tani kurang optimal. Rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung perekonomian akan memperlambat produktivitas pelaku ekonomi di berbagai sektor tersebut.

- Ketahanan ekonomi inklusif dan terus tumbuh;

Pemulihan dan peningkatan perekonomian di Gorontalo Utara tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan sektoral, namun juga harus diimplementasikan secara luas dengan mempertimbangkan aspek ketimpangan dan kemiskinan secara inklusif. Artinya pembangunan yang dilaksanakan mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dan kemakmuran ekonomi secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan secara inklusif (*inclusive growth*), tidak hanya akan dirasakan manfaatnya secara makro, manfaat konteks mikro juga terasa, seperti misalnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin yang berkorelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan. Upaya itu diupayakan misalnya melalui peningkatan kesempatan kerja, akses terhadap faktor-faktor produksi, pengimplementasian jaring pengaman sosial, dan lain sebagainya, yang

memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

- Masyarakat yang sehat dan berdaya saing;

  Pembangunan sumber daya manusia merupakan merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena semakin bagus SDM akan bermuara pada percepatan pembangunan dan katalis dalam memajukan suatu bangsa. Pengembangan SDM tersebut dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan pendidikan yang optimal dan setara, pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan dan layanan kerja, pengenalan teknologi baru, reformasi birokrasi, dan memberikan kesempatan untuk beraktualisasi.

- Pemerintahan yang transformative dan pelayanan public yang berkualitas.

  Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan (UU Nomor 25 Tahun 2009). Ruang lingkup pelayanan publik menurut UU tersebut meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik sangat penting dalam pemerintahan, karena dengan adanya standar pelayanan publik, memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan, baik persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Sehingga secara umum, pelayanan publik yang prima dan berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, dalam artian lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih baik. Hal tersebut dapat diketahui dari 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang menjadi tolak ukur dalam memberikan kepuasan

pada masyarakat yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangibles*.

1.2 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

1.2.1 Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berada dibawah Pemerintah Provinsi Gorontalo

1.2.2 Tugas Pokok

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dan Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2.3 Fugsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan nasional di Daerah yang meliputi kelembagaan daerah,sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan,dan akuntabilitas aparatur;
b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang meliputi kelembagaan daerah, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur;
c. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya secara berjenjang kepada DPRD, Gubernur dan Presiden.

1.2.4 Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesua potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai tindaklanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

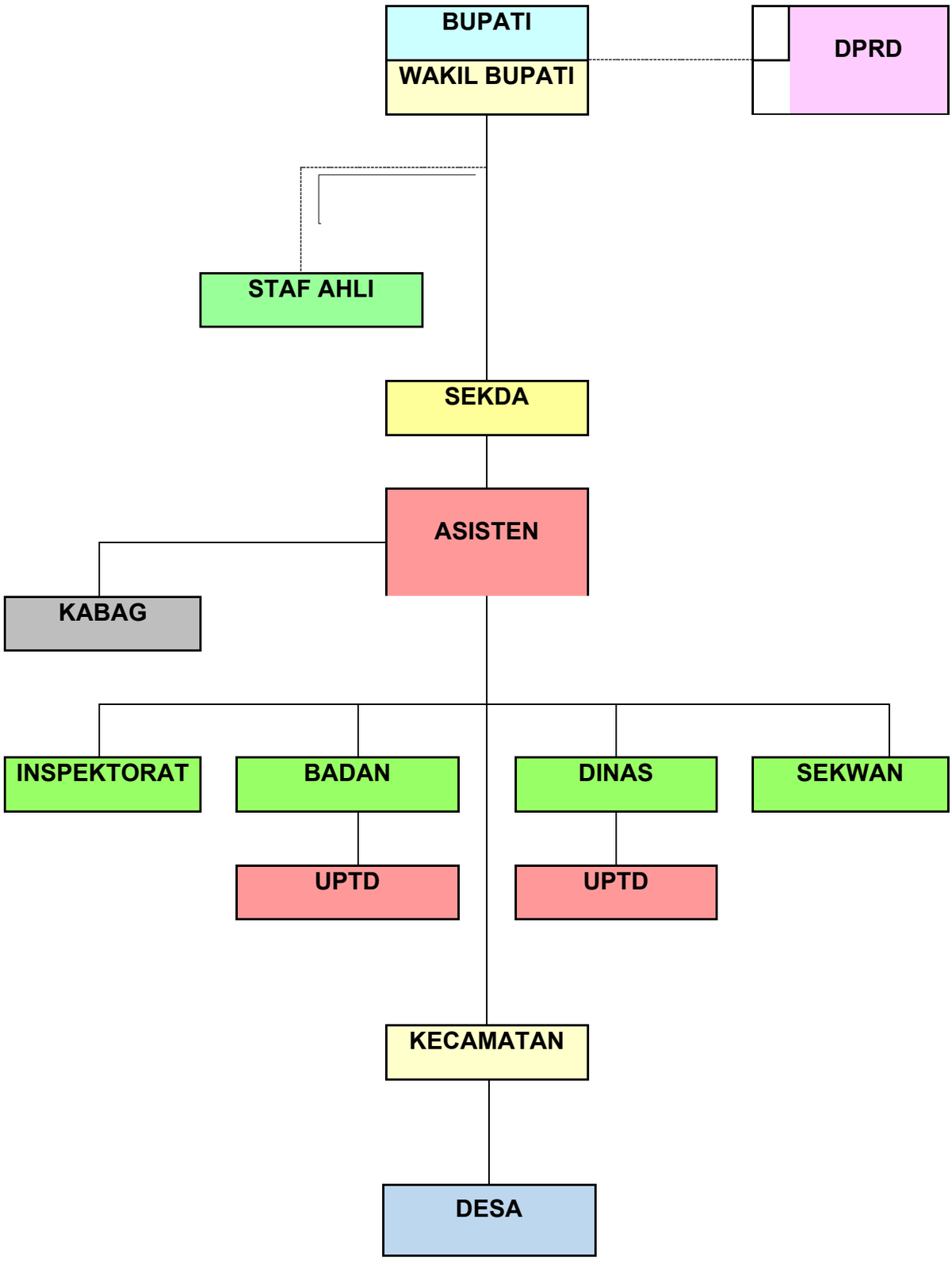
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 berjumlah 42 Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah;
2) Sekretariat DPRD;
3) Inspektorat Daerah;
4) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
5) Badan Keuangan;
6) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9) Dinas Pendidikan;
10) Dinas Kesehatan;
11) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
14) Dinas Sosial;
15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
17) Dinas Kelautan dan Perikanan
18) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
19) Dinas Lingkungan Hidup;
20) Dinas Ketahanan Pangan;
21) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
22) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
25) Dinas Tanman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
26) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
27) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
28) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
29) Dinas Perhubungan;
30) Dinas Komunikasi dan Informatika;
31) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
32) Kecamatan Anggrek;

33) Kecamatan Monano;
34) Kecamatan Sumalata;
35) Kecamatan Sumalata Timur;
36) Kecamatan Kwandang;
37) Kecamatan Tomilito;
38) Kecamatan Gentuma Raya;
39) Kecamatan Atinggola;
40) Kecamatan Biau;
41) Kecamatan Tolinggula;
42) Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan public, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 sebanyak 18 UPTD, yaitu :

1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
2) RSUD Tolinggula Melayani;
3) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
4) Puskesmas (15 Unit).


BUPATI
WAKIL BUPATI
DPRD
STAF AHLI
SEKDA
ASISTEN
KABAG
INSPEKTORAT
BADAN
DINAS
SEKWAN
UPTD
UPTD
KECAMATAN
DESA

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat(Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja, Gambaran Singkat tentang Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, pembandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 berdasarkan dokumen RPD tahun 2024-2026 dan untuk beberapa indicator realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipastif yang diambil dan penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 dan upaya/langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026 dilakukan melalui pendekatan *teknokratik* yang *holistik.* berbeda dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memuat visi dan misi daerah untuk jangka menengah. Hal ini dikarenakan kepala daerah dalam periode 2024-2026 sebagai pelaksana RPD 2024-2026 merupakan penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pejabar berwenang. Bukan kepala daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2009-2029, dan isu strategis aktual.

Dalam periodesasi RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029, tahun 2024-2026 merupakan bagian periode RPJMD ke-4 (2024-2028), yang merupakan tahap kondisi daerah yang seharusnya sudah mendekati kedewasaan yang ditandai dengan kondisi yang mandiri, adil, maju, dan makmur. Visi pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2009–2029, yaitu **“Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera dan Berkeadilan”.**

Penjelasan dari pernyataan visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Gorontalo Utara harus bisa menciptakan sistem perekonomian yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global berbasis kepada potensi sumberdaya alam unggulan yang dimiliki, serta serta ditopang oleh nilai nilai sosial budaya dan jati diri masyarakat yang religius, mandiri, dan produktif dengan jalan pengembangan sektor ekonomi riil yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan mampu menjalankan sistem perekonomian secara efisien, sehingga mampu bersaing pada tingkat

regional, nasional, bahkan internasional;

2. Kabupaten Gorontalo Utara hendaknya dihuni oleh manusia-manusia yang unggul, berakhlak, berbudaya, berdisiplin tinggi, produktif, serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Gorontalo Utara yang lebih maju dan modern;
3. Kabupaten Gorontalo Utara hendaknya memiliki penataan wilayah dan lingkungan yang baik, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan;
4. Kabupaten Gorontalo Utara harus memiliki infrastruktur yang modern untuk menopang sistem perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan terutama pada sektor pertanian dan perikanan sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Selanjutnya, berdasarkan visi pembangunan daerah tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan kualitas kesejahteraan hidup ekonomi masyarakat yang mempunyai daya saing global yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman, dengan tujuan akhir yaitu: (a) Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi melalui penyediaan tenaga pendidik yang handal dan ditunjang dengan infrastruktur sarana pendidikan yang bertaraf nasional dan internasional; (b) Terwujudnya pemerataan dan perluasan pendidikan bagi warga masyarakat Gorontalo Utara melalui pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi; (c) Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya sistem perekonomian wilayah hanya akan sukses jika didukung dengan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dan berakhlak sesuai dengan karakter geografis wilayah pesisir, sehingga masyarakat memiliki nilai-nilai, perilaku, dan keterampilan yang tidak hanya berorientasi ke darat (continent-based) namun juga berorientasi ke laut (marine-based). Hal ini dilakukan melalui pengembangan sistem pendidikan yang relevan dengan potensi lokal. Selain itu perlu diperhatikan pula peningkatan kualitas kesehatan masyarakat baik secara jasmani maupun rohani yang berorientasi kepada peningkatan produktivitas. Kualitas sumberdaya manusia diharapkan adalah individu yang seimbang dalam aspek, baik fisik, spiritual, emosional, dan intelektual, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dalam mengelola berbagai potensi alam di darat dan di laut.

2. Memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Mewujudkan penataan lingkungan yang lebih hidup melalui: (a) Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman bagi warga masyarakat; (b) Terwujudnya program rehabilitasi hutan dan lahan secara mandiri; (c) Terwujudnya peningkatan sistem mitigasi bencana alam; (d) Meningkatnya sistem pengelolaan sampah terpadu dan modern, dengan strategi pembangunan yang dilakukan:
   - Pembangunan kota berwawasan lingkungan;
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau;
   - Peningkatan sistem pengendalian banjir;
   - Peningkatan pengelolaan sampah.
3. Membangun infrastruktur dan perekonomian yang kuat. Untuk mewujudkan visi sebagai kekuatan perekonomian yang kuat di kawasan pantai utara Laut Sulawesi, perekonomian Kabupaten Gorontolo Utara diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan berbasis sumberdaya alam lokal yang didukung oleh upaya penciptaan nilai tambah melalui pengembangan kegiatan industri serta jasa-jasa penunjangnya, sehingga memiliki dampak yang besar bagi perekonomian wilayah secara keseluruhan. Untuk itu, perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk melakukan investasi, antara lain melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, birokrasi perizinan yang efisien, serta situasi keamanan yang kondusif dan stabil. Disamping itu, usaha pengelolaan sumberdaya alam diarahkan pada sistem kemitraan yang adil dan sejajar bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya agar manfaatnya dapat dinikmati secara merata oleh dunia usaha, pekerja, rakyat setempat, maupun pemerintah daerah.
4. Menciptakan masyarakat yang demokratis. Misi ini dapat dicapai melalui memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
5. Menghapus kemiskinan dan ketertinggalan wilayah. Pengembangan perekonomian wilayah Kabupaten Gorontolo Utara melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung pengembangan sektor unggulan berbasis sumberdaya alam secara terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir dan antar daerah secara horizontal (inter-linkage), diarahkan pada upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Pengangguran dan kemiskinan yang terjadi selama ini disebabkan kurang berkembangnya sektor riil, sehingga melalui

pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan beserta industri dan jasa penunjangnya, akan terserap banyak tenaga kerja yang akan mengurangi angka pengangguran secara signifikan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pada gilirannya diharapkan angka kemiskinan akan berkurang sekaligus mengentaskan ketertinggalan Kabupaten Gorontalo Utara dibandingkan wilayah lain.

2. 2 Tujuan dan Sasaran

Dari hasil penyandingan muatan konsideran dari Misi dalam RPJPD Gorontalo Utara, Agenda Pembangunan RPJMN, Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo, serta isu-isu strategis dan aktual di Gorontalo Utara, teridentifikasi empat dimensi yang memiliki kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan (environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi manusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance). Dimensi lingkungan adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik wilayah yang digunakan manusia dalam rangka menyediakan sarana bagi segala aktivitasnya. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi sosial manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasikan menjadi 4 tujuan dengan 16 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (cross-cutting issue). Penjabaran tujuan sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026

Visi : Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera dan Berkeadilan			
Tujuan		Sasaran	
Misi I : Memperbaiki kualitas lingkungan hidup			
T1	Terwujudnya daerah yang sustainabel dan resilien	S1.1	Meningkatnya migitasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah
		S1.2	Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim
		S1.3	Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik
Misi 2 : Membangun infrastruktur dan perekonomian yang kuat			
Misi 3 : Menghapus kemiskinan dan ketertinggalan wilayah			
T2	Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan.	S2.1	Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah
		S2.2	Meningkatnya kesempatan kerja dan agalitas tenaga kerja
		S2.3	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial
		S2.3	Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan
Misi 4 : Peningkatkan kualitas sumber daya manusia			
T3	Tercapainya pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan.	S3.1	Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi
		S3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		S3.3	Menigkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak
		S3.4	Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya
Misi 5 : Menciptakan masyarakat yang demokratis			
T4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas	S4.1	keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel
		S4.2	Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik
		S4.3	Meningaktanya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah
		S4.4	Meningkatnya kualitas dan aksesbilitas layanan publik
		S4.5	Meningkatnya daya, profesesionalisme, dan iklim kerja aparatur

Dengan memperhatikan visi misi RPJD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009-2029, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, isu strategis yang aktual, selanjutnya RPD Kabuoaten Gorontalo Utara Tahun 204-2026 menjabarkan 4 Tujuan, 16 Sasaran Strategis, dan 26 Indikator Kinerja Utama(IKU) dengan target yang ditetapkan selama 3 tahun yakni 2024,2025, dan 2026, yang berkelanjutan menjadi acuan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Targetnya masih sama dengan RKPD tahun 2025 sebelum perubahan.

Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, Indikator dan Target 2024-2026

Visi/ Misi	Tujuan /sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Proyeksi 2022	Target Kinerja			Kondisi Akhir (2026)
						2024	2025	2026	
Visi : Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera dan Berkeadilan									
Misi 1 : Membangun Kualitas Lingkungan Hidup									
Tujuan 1: Terwujudnya daerah yang sustainabel dan resilien		**Penurunan emisi gas rumah kaca**	**Persen**	**N/A**	**N/A**	**10**	**10**	**10**	**10**
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,37	134,35	134,25	134,20	134,15	134,15
	Sasaran 1.2 : Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,69	75,92	70	70	70	70
	Sasaran 1.3 : Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Persen	69,13	72,06	72,45	72,67	73,00	73,00
Tujuan 2 : Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan		**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	**Poin**	**4,72**	**4,67**	**4,70**	**4,72**	**4,74**	**4,74**
	Sasaran 2.1 : Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,2	3,3	4,50	4,75	5,10	5,10
		Persentase status “Desa Mandiri”	Persen	1,62	9,76	12,19	13,82	14,63	14,63
		PDRB per kapita	Ribuan Rupiah	18.781	18.956	19.456	19.657	20.236	20.236

Visi/ Misi	Tujuan /sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Proyeksi 2022	Target Kinerja			Kondisi Akhir (2026)
						2024	2025	2026	
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,3	2,02	2,15	2,10	2,00	2,00
	Sasaran 2.3 : Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	Persen	17,23	17,24	16,55	16,25	15,90	15,90
		Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.064	9.636	10.380	10.580	10.780	10.780
		Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	2,13	4,45	4,50	4,25	4,00	4,00
	Sasaran 2.4 : Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	0,306	2,66	2,75	2,85	3,00	3,00
Tujuan 3 : Tercapainya pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**65,21**	**66,01**	**66,55**	**66,8**	**67,10**	**67,10**
	Sasaran 3.1 : Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi	Indeks Dimensi Pendidikan	Poin	9,805	9,815	9,821	9,831	9,837	9,837
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	73,99	74,05	74,1	74,15	74,15
	Sasaran 3.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting	Persen	65,93	29,3	29,15	29,1	29,05	29,05
		Angka Harapan Hidup	Tahun	81,17	66,3	66,5	66,6	66,75	66,75
	Sasaran 3.3 : Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,17	81,20	81,25	81,26	81,27	81,27
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	-	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama

Visi/ Misi	Tujuan /sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Proyeksi 2022	Target Kinerja			Kondisi Akhir (2026)
						2024	2025	2026	
	Sasaran 3.4 : Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	Kejadian	N/A	457	350	330	300	300
Tujuan 4 : Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**50,93**	**50,95**	**51**	**51**	**51**	**51**
	Sasaran 4.1 : Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntable	Opini laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	3,82	4,36	4,38	4,75	5,00	5,00
	Sasaran 4.2 : Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks maturitas SPBE	Poin	1,55	1,67	1,75	1,75	1,75	1,75
	Sasaran 4.3 : Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat akuntabiltas kinerja Instansi pemerintah	Satuan	63,77	64,81	65	67	70	70
		Maturitas SPIP	Level	2,841	-	2,9	2,9	3	3
	Sasaran 4.4 : Meningkatnya kualitas dan aksebilitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,7	3,83	3,90	3,95	4,10	4,10
	Sasaran 4.5 : Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	35,93	35,79	36,00	36,10	36,20	3,60

2.3 Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Indikator KInerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode waktu Tahun 2024-2026. IKU Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang juga termuat dalam dikumen RPD periode 2024-2026 ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

IKU Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontao Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Risiko Bencana
2. Indeks Kualitas Lingkungan
3. Pemenuhana layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan
4. Laju pertumbuhan ekonomi
5. Presentase status :Desa Mandiri”
6. PDRB Per kapita
7. Tingkat Pengangguran terbuka
8. Persentase Penduduk miskin
9. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan
10. Indeks Ketahanan Pangan
11. Tingkat kemiskinan ekstrem
12. Indeks Daya Saing Daerah
13. Indeks Dimensi Pendidikan
14. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
15. Prevalensi stunting
16. Angka Harapan Hidup
17. Indeks Pembangunan Gender
18. Predikat Kabupaten Layak Anak
19. Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam
20. Opini laporan keuangan daerah
21. Rasio kemandirian keuangan daerah
22. Indeks Maturitas SPBE
23. Predikat Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
24. Maturitas SPIP
25. Indeks Kepuasan Masyarakat
26. Indeks Profesionalitas ASN

2.4 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Renacana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada Tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetepana Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaian Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target
Tujuan 1 : Terwujudnya daerah yang sustainabel dan resilien		**Penurunan emisi gas rumah kaca**	**10**
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Indeks Risiko Bencana	134,25
	Sasaran 1.2 : Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70
	Sasaran 1.3 : Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	72,45
	Sasaran 2.1 : Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	134,25
Tujuan 2 : Terbangunnya Perekonomian yang Inklusif serta Berdaya Saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan.		**Indeks Pembngunan Ekonomi Inklusif**	**4,70**
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja.	Tingkat pengangguran terbuka	2,15

	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target
	Sasaran 2.3 : Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	16,55
		Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	10.380
		Indeks Ketahanan Pangan	80,00
		Tingkat kemiskinan ekstrem	4,50
	Sasaran 2.4 : Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	2,75
Tujuan 3 : Tercapainya pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan		**Indeks Pembangunan Manusia**	**66,55**
	Sasaran 3.1 : Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi	Indeks Dimensi Pendidikan	9,821
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	74,05
	Sasaran 3.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting	29,15
		Angka Harapan Hidup	66,5
	Sasaran 3.3 : Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	81,25
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama
	Sasaran 3.4 : Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	350
Tujuan 4 : Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**10**
	Sasaran 4.1 Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	WTP
		Rasio kemandirian keuangan daerah	4,38
	Sasaran 4.2 : Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks Maturitas SPBE	1,75

	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target
	Sasaran 4.3 : Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65
		Maturitas SPIP	2,9
	Sasaran 4.4 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,90
	Sasaran 4.5 : Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	36,00

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan RPD dan RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025, meskipun tidak banyak kebijakan Perubahan Perjanjian Kinerja, tetapi untuk Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama dengan targetnya tidak mengalami perubahan. Berikut Perjanjian Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 dengan 16 Sasaran Strategis dan 26 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinrja Utama	Target
1	Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Indeks Risiko Bencana	134,25
2	Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70
3	Pemenuhan infrastruktur strategis dan fasilitas layanan dasar publik	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	72,45 %
4	Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,50 %
		Persentase status “Desa Mandiri”	12,19 %
		PDRB per kapita	Rp.19.456
5	Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	2,15 %
6	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	16,55 %
		Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Rp.10.380
		Indeks Ketahanan Pangan	80,00
		Tingkat kemiskinan ekstrem	4,50 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinrja Utama	Target
7	Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	2,75
8	Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi	Indeks Dimensi Pendidikan	9,821
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	74,05
9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting	29,15 %
		Angka Harapan Hidup	66,5 Tahun
10	Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	81,25
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat Pratama
11	Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	350 Kejadian
12	Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Opini WTP
		Rasio kemandirian keuangan daerah	4,38 %
13	Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks Maturitas SPBE	1,75
14	Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65
		Maturitas SPIP	Level 2,9
15	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,90
16	Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	36,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-
	Program Penaggulangan Bencana	430.354.060
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	79.523.125
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	5.100.000
4.	Program Pengelolaan Persampahan	35.244.000

5.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100.000.000
6.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-
7.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	624.632.998
8.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13.500.000
9.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	200.000.000
10.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.170.712.241
11.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	66.000.000
12.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	21.000.000
13.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-
14.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-
15.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	23.600.000
16.	Program Pengembangan UMKM	20.000.000
17.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3.300.000
18.	Program Promosi Penanaman Modal	3.000.000
19	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	62.760.421
20.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	-
21.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	113.370.000
22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	228.087.200
23.	Program Administrasi pemerintah Desa	-
24.	Program Pemasaran Pariwisata	-
25.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	62.925.000
26.	Program Pelatihan Kerja	213.083.958
27.	Program Penempatan Tenaga kerja	-
28.	Program Hubungan Industrial	1.008.000.000
29.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	50.000.000
30.	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100.000.000

31.	Program pemberdayaan sosial	173.674.246
32.	Program Rehabilitas Sosial	125.169.530
33.	Program perlindungan dan jaminan Sosial	53.552.850
34.	Program Penanganan Bencana	82.499.505
35.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-
36.	Program Peningkatakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	159.000.000
37.	Program Penanganan Kerawangan Pangan	245.350.000
38.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-
39.	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	163.755.710
40.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	22.950.000
41.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	461.003.525
42.	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	73.291.900
43	Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian	143.505.600
44.	Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	455.713.900
45.	Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	10.000.000
46.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	155.670.860
47.	Program Perizinan Usaha Pertanian	-
48..	Program Peningkatan Distribusi Sarana Perdagangan	80.237.354
49	Program standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-
50.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	396.250.400
51	Program Pengelolaan Perikanan dan Budidaya	-
52.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	992.422.332
53.	Program pengelolaan Pelayanan	-
54.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
55.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	316.787.600

56.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	268.705.780
57.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	343.997.978
58.	Program pengelolaan pendidikan	36.818.880.961
59.	Program Pengembangan Kurikulum	-
60.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
61.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	369.687.806
62.	Program Pembinaan Perpustakaan	403.475.000
63.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.457.990.240
64.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.983.724.000
65.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	255.577.599
66.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.994.248.275
67.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.563.040.000
68.	Program Pengendalian Penduduk	87.600.000
69.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.215.920.550
70.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	941.949.000
71.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	50.000.000
72.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	58.354.000
73.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	174.934.200
74.	Program Perlindungan Perempuan	88.917.000
75.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-
76.	Program Perlindungan Khusus Anak	8.563.040.000
77.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.635.102
78.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	558.860.424
79.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	344.796.000
80.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	60.000.000
81.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	9.964.601.988

82.	Program Pengelolaan Keuangan daerah	1.501.103.680
83.	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	658.009.165
84.	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	748.545.366
85.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.692.302.700
86.	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	42.500.000
87.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	294.289.028.733
88.	Program Pendaftaran Penduduk	234.584.137
89.	Program Pencatatan Sipil	13.446.300
90.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4. 427.326
91.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-
92.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.674.999.952
93.	Program Pelayanan Penanaman Modal	23.719.640
94.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	6.941.860.800
95.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.440.000
96.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-
97.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.800.000
98.	Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-
99.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.782.000
100.	Program Pengelolaan Arsip	-
101.	Program Kepegawaian daerah	30.300.000
104.	Program Pengembangan Sumber Daya manusia	44.593.500
Jumlah		**442.950.789.556**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan prinsip yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa efektif dan efisien suatu kebijakan dan program dilaksanakan. Kabupaten Gorontalo Utara secara konsisten berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang transparan serta berbasis pada hasil. Dalam upaya untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola dengan sebaik-baiknya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan evaluasi rutin terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses akuntabilitas ini tidak hanya mencakup pelaporan yang akurat dan tepat waktu, tetapi juga pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas program-program yang dijalankan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

3.1 Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\ \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{Target-(Realisasi-Target)}{Target} \times 100\ \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rekapitulasi Capaian Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tujuan 1 : Terwujudnya daerah yang sustainabel dan resilien		**Penurunan emisi gas rumah kaca**	**10%**	**N/A**	-
1	Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Indeks Risiko Bencana	134,25	204,52	65,64
				Rata-Rata Capaian	**65,64**
2	Memulihkan Ekosistem dan Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	79,59	114
				Rata-Rata Capaian	114
3	Pemenuhan Infrastruktur Strategis dan Fasilitas Layanan Dasar Publik	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	73	N/A	-
				Rata-Rata Capaian	**0**
Tujuan 2 : Terbangunnya Perekonomian yang Inklusif serta Berdaya Saing yang disertai Penghidupan yang Layak, dan Pemerataan Kesejahteraan		**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	**4,72**	**N/A**	**-**
4	Tumbuhnya Ekonomi Desa dan Daerah Berbasis Keunggulan Komparatif Daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,75	4,17	87,79
		2. Persentase status “Desa Mandiri”	13,82	44,44	321
		3. PDRB per kapita	19,657	19,79	100,7
				Rata-Rata Capaian	**169,83**

5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Agilitas Tenaga Kerja	Tingkat penganggur an terbuka	2,1	3,05	69
Rata-Rata Capaian					**69**
6	Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1. Persentase penduduk miskin	16,25	15,89	102
		2. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	10,580	10,678	100,9
		3. Indeks Ketahanan Pangan	80	66,59	83,23
		4. Tingkat kemiskinan ekstrem	4,25	N/A	-
Rata-Rata Capaian					**81,3**
7	Menguatnya Daya Saing Daerah Melalui Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	2,85	3,40	119
Rata-Rata Capaian					**119**
Tujuan 3. Tercapainya Pembangunan Manusia Menuju Masyarakat Madani Melalui Pembangunan yang Berkesetaraan		**Indeks Pembangunan Manusia**	**66,8**	**69,62**	104
8	Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi	1. Indeks Dimensi Pendidikan	9,831	9,95(2024)	101
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	74,1	0,74	0,99
Rata-Rata Capaian					**51,0**
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Prevalensi stunting	29,1	12,52	232
		2. Angka Harapan Hidup	66,6	70,25	105
Rata-Rata Capaian					**168,5**
10	Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender	81,26	82.43*)	101
		2. Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	100
Rata-Rata Capaian					**100,5**
11	Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	330	2	0,60
Rata-Rata Capaian					**0,60**

Tujuan 4. Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**51**	**67,91**	**133**
12	Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel	1. Opini laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100
		2. Rasio kemandirian keuangan daerah	5	7,02	140
				Rata-Rata Capaian	**120**
13	Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks Maturitas SPBE	1,75	3,16	180
				Rata-Rata Capaian	**180**
14	Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67	64,14	95,73
		2. Maturitas SPIP	2,9	2,9	100
				Rata-Rata Capaian	**97,97**
15	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,95	3,46	87,59
				Rata-Rata Capaian	87,59
16	Meningkatnya daya, profesion alisme, dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	36,1	80,65	223
				Rata-Rata Capaian	**223**

*) Data Tahun 2024

Berdasarkan tabesl diatas, maka kinerja capaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

Capaian kinerja 91% ≥ kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 9 sasaran, atau 56 Persen

Capaian kinerja 76% ≥ 90% kategori “Tinggi” sebanyak 2 sasaran, atau 12, 5 persen;

Capaian kinerja 66% ≥ 75% kategori “Sedang” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25 persen;

Capaian kinerja 51% ≥ 65% kategori “Rendah” sebanyak 2 sasaran, atau 12, 5 persen;

Capaian kinerja ≤ 50% kategori “Sangat Rendah” sebanyak 2 sasaran, atau 12,5 persen.

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Capaian IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,25	204,52	65,64
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70	79,59	114
3	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Persen	73	N/A	-
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	4,17	87,79
5	Persentase status “Desa Mandiri”	Persen	13,82	44,44	321
6	PDRB per kapita	Ribuan Rupiah	19,657	19,79	100,7
7	Tingkat penganggur an terbuka	Persen	2,1	3,05	69
8	Persentase penduduk miskin	Persen	16,25	15,89	102
9	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Ribuan Rupiah	10,580	10,678	100,9
10	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80	66,59	83,23
11	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	4,25	N/A	-
12	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	2,85	3,40	119
13	Indeks Dimensi Pendidikan	Poin	9,831	9,95*)	101
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	74,1	0,74	0,99
15	Prevalensi stunting	Persen	29,1	12,52	232
16	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,6	70,25	105
17	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,26	82.43*)	101
18	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	100
19	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	Kejadian	330	2	0,60

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
20	Opini laporan keuangan daerah	Poin	WTP	WTP	100
21	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	5	7,02	140
22	Indeks Maturitas SPBE	Poin	1,75	3,16	180
23	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	67	64,14	95,73
24	Maturitas SPIP	Level	2,9	2,9	100
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,95	3,46	87,59
26	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	36,1	80,65	223

*)Data Tahun 2024

3. 2 Analis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

Tingkat keberhasilan instansi pemerintah harus memperhatikan seluruh aktivitas yang di ukur tidak semata-mata kepada input dari program instansi tetapi lebih ditekankan pada output, proses, manfaat, dan dampak dari program instansi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasar sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Stabilitas Daerah.

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian tujuan pertama yang ditetapkan dalam RPD tahun 2024-2026 yaitu “Terwujudnya Daerah yang Sustainbel dan Resilien”. Pencapaian sasaran pertama ini di dukung oleh Badan Penanggulangan Bencana sebagai perangkat daerah utama. Untuk mengukur sasaran pertama tersebut ada 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata hasil capaian kinerja sasaran sebesar 65,64 % atau kategori predikat Rendah. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

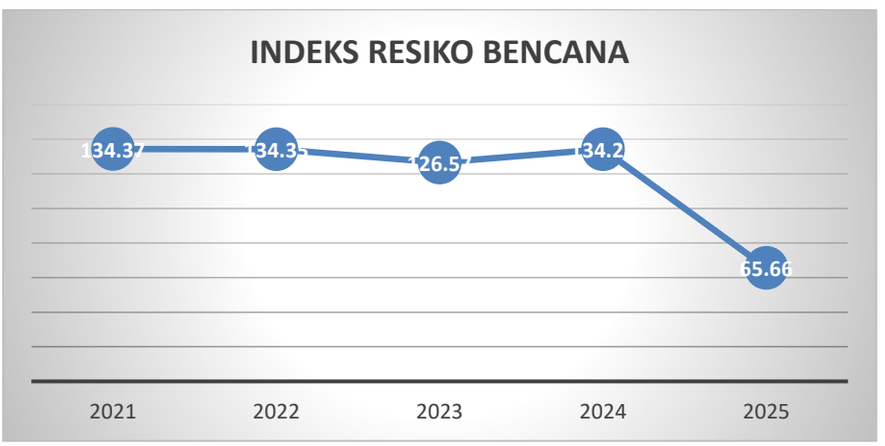
Tumbuhnya Ekonomi Desa dan Daerah berbais keunggulan kompratif Daerah							
Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD(2026)	Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Resiko Bencana	Poin	126,82	134,25	204,52	65,64	134,15	65,60

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Kab.Gorontalo Utara , 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Indeks Risiko Bencana dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari target Nilai 134,25 terealisasi 204,52 sehingga capaiannya sebesar 65,64 %. Jika dibandingan dengan tahun 2024 indeks risiko bencana Kabupaten Gorontalo Utara mengalami kenaikan 77 poin, dimana indeks risiko bencana daerah pada tahun 2024 adalah 126,82 .di bandingkan dengan target akhir RPD sebesar 134,15 maka capaian Tahun 2025 terhadap RPD adalah 65,60 %. Berikut perkembangan Indeks bencana Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021-2025 sebagaimana di tampilkan dalam grafik berikut :

Grafik 3.1 Indeks Resiko Bencana
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021-2025



Sumber data : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2025

Untuk Indeks Risiko Bencana (IRB), cara menilai capaian berbeda dengan indikator yang sifatnya “semakin tinggi semakin baik”, pada IRB justru

sebaliknya semakin tinggi nilai IRB semakin buruk (risiko bencana semakin buruk) Pada Tahun 2025, nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gorontalo Utara nilai IRB naik 77 poin, yang berarti tahun 2025 risiko bencana di Gorontalo Utara semakin buruk. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kejadian Bencana Hidrometeorologi.
   Sepanjang tahun 2025 terjadi peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah kecamatan. Tingginya intensitas curah hujan dan kondisi geografis yang rentan menyebabkan komponen bahaya (hazard) meningkat.
2. Kerentanan Wilayah dan Sosial Ekonomi.
   Kabupaten Gorontalo Utara memiliki karakteristik wilayah pesisir dan daerah aliran sungai yang rentan terhadap banjir. Selain itu, kondisi infrastruktur dan pemukiman di wilayah rawan turut meningkatkan nilai kerentanan.
3. Kapasitas Mitigasi yang perlu ditingkatkan.
   Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat masih perlu diperkuat agar mampu menurunkan tingkat risiko secara signifikan.

Peningkatan nilai IRBI pada tahun 2025 tidak semata-mata menunjukkan penurunan kinerja, melainkan mencerminkan adanya dinamika risiko akibat faktor alam dan sosial yang berkembang. Hal ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperkuat strategi pengurangan risiko bencana melalui:

- Peningkatan system peringatan dini
- Penguatan kapasitas desa Tangguh bencana
- Pembangunan insfrastruktur mitigasi
- Serta peningkatan edukasi dan kesiapsiagaan Masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada tahun berikutnya nilai risiko bencana dapat ditekan dan ketahanan daerah terhadap bencana semakin meningkat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berupaya untuk tetap konsisten dalam melakukan perbaikan sebagai bentuk Upaya untuk indikator Indeks Resiko Bencana yaitu semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) maka akan semakin menurun untuk Indeks Resiko Bencana. Realisasi 204,52 pada Tahun 2025 masih perlu diturunkan dengan memberikan priorotas pada aspek penigkatan efektifitas dan mitigasi bencana, penegembangan sistem informasi diklat dan logistic penanganana tematik kawasan rawan bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat

bencana dan penegmbangan sistem pemulihan dini.

Sasaran menurunnya tingkat kerawanan bencana dengan Indikator Indeks resiko Bencana dapat di capai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.5 Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2025 :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-
2.	Program Penanggulangan Bencana	430.354.060	391.312.630	90,92
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	79.523.125	73.843.700	92,85
Jumlah		**509.877.185**	**465.156.330**	**91,88**

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 465.156.330 dari anggaran sebesar Rp509.877.185 atau 91,88 %.

Untuk melihat Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pelaksanaan sasaran Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah dengan Indikator Indeks Risiko Bencana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6 Tabel Efisiensi sasaran 1

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah	Indeks Risiko Bencana	65,64	91,88	71,4

Jika dilihat dari aspek efisiensi, perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar **71,4%**. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan **belum efisien**, dimana penggunaan anggaran relatif tinggi namun belum diikuti dengan capaian kinerja yang sebanding.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 Memulihkan ekosistem dan Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan sasaran strategis yang

berkenaan dengan lingkungan hidup yaitu Memulihkan ekosistem dan Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim. bertujuan untuk memberikan dukungan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan salah satu pendukung pencapaian tujuan pertama yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Daerah yang Sustainabel dan Resilien**.** Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Nilai IKLH suatu Kawasan merupakan gambaran atau indikasi yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang periode tertentu. Indeks atau indicator kualitas lingkungan hidup merupakan sarana yang digunakan untuk meredukasi banyaknya data dan informasi, sehingga menjadi bentuk yang paling mudah untuk dipahami namun esensinya tetap dapat dipertahankan. Data capaian sasaran strategis Memulihkan ekosistem dan Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim Tahun 2025 Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar **114%** dengan kategori predikat "**Sangat Tinggi**", Untuk pengukuran capain kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.2 Rumus Perhitungan IKLH

RUMUS PERHITUNGAN IKLH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidupn(IKLH)Nasional	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKL)+(0.099x IKAL)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidupn(IKLH)Provinsi	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKL)+(0.099x IKAL)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidupn(IKLH)Kabupaten/Kota	IKLH = 90.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim. dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Sasaran 2

Memulihkan ekosistem dan Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim.						
Indikator	**Satuan**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD(2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
		Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70	79,59	114	70	114

Pencapaian kinerja IKLH dipengaruhi komponen perhitungan IKLH Kabupaten Gorontalo Utara, meliputi komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara, perhitungan IKLH diuraikan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

= (0,376 x 70,14) + (0,405 x 86,60) + IKTL (0,219 x 82,86)

= 79,59

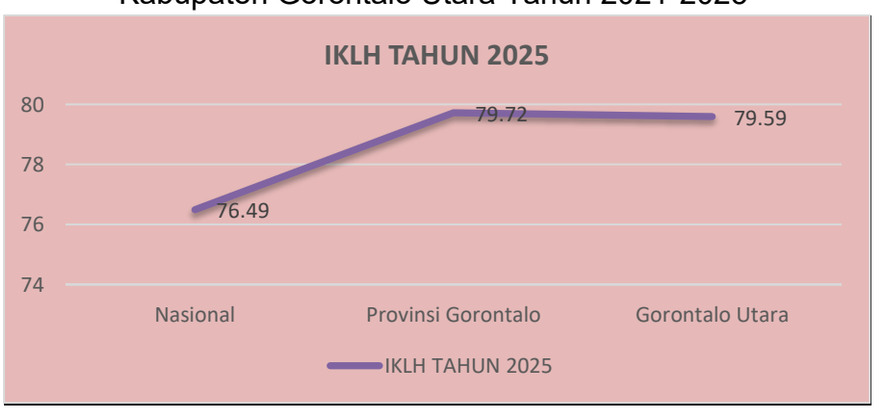
Dengan demikian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 adalah 79,59 dari target sebesar 70 Terdapat kenaikan 9,59 Poin maka dapat dikategorikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk pada kategori dengan kondisi baik.

Tabel 3.8 Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kategori	Angka Rentang				
Sangat Baik	90	≤	×	≤	100
Baik	70	≤	×	≤	90
Sedang	50	≤	×	≤	70
Kurang	25	≤	×	≤	50
Sangat Kurang	0	≤	×	≤	25

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Grafik 3.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021-2025



Berdasarkan surat penyampaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan telah melakukan penghitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2025 yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA),

Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKLH tersebut merupakan agregasi dari penghitungan data pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Gabmabr 3.3

Gebrek Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup	Penanaman Pohon Oleh Dinas Lingkungan Hudup
	

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut :

- Faktor Pendorong :
  1. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh ulu-ulu sungai dan pemberian izin secara ketat bagi usaha yang membuang limbah ke sungai mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai;
  2. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah sudah mulai meningkat, animo masyarakat untuk aktif di bank sampah juga meningkat dilihat dari jumlah nasabah bank sampah yang terus meningkat.
- Faktor Penghambat :

  Selain faktor pendorong tidak luput juga dari faktor penghambat yang sering di hadapi yakni :
  1. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gorontalo Utara, terutama jam-jam masyarakat beraktivitas serta setiap akhir minggu dan libur.
  2. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Gorontalo Utara.
  3. Pengetahuan masyarakat mengenai Dokumen Lingkungan belum maksimal.

Dari beberapa hambatan yang dihadapi, kedepannya akan menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan upaya-upaya yakni :

1. Sosialisasi dengan mencetak booklet penyusunan Dokumen Lingkungan agar masyarakat mengetahui jenis usaha yang wajib mempunyai dokumen lingkungan, dan memahami cara penyusunan dokumen lingkungan yang baik dan benar Melakukan pembinaan tentang penyusunan Dokumen Lingkungan setiap tahun dengan harapan dapat mengetahui dan memahami informasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai melalui Kerja Bakti rutin Gerakan Kebersihan Sungai yang secara rutin telah dilaksanakan setiap tahun.
3. Melakukan publikasi secara intensif kepada masyarakat tentang kondisi udara di Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga meningkatkan kepedulian dan informasi lingkungan kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran nilai IKLH ini tentunya di pengaruhi oleh upaya upaya yang dilakukan sepanjang Tahun 2025 berupa Pelaksanaan program sebagai berikut

Tabel 3.9 Tabel Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	5.100.000	4.455.000	100 %
2.	Program Pengelolaan Persampahan	35.244.000	35.226.294	100 %
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100.000.000	99.770.000	100 %
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	-	0 %
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	624.632.998	582.802.813	93,30 %
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13.500.000	11.915.000	88,27 %
Jumlah		**778.476.998**	**734.170.097**	**93.73 %**

Tabel 3.10 Tabel Efisiensi sasaran 2

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Memulihkan ekosistem dan Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	114 %	93,73 %	121,6 %

Pencapaian sasaran strategis *"Memulihkan Ekosistem dan Meminimalisir Dampak Perubahan Iklim"* pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang mencapai 114%, melampaui target yang telah ditetapkan, sementara capaian realisasi anggaran sebesar 93,73%, yang berarti tidak seluruh anggaran yang tersedia digunakan.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 121,6%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sangat efisien. Dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu, pemerintah daerah mampu menghasilkan kinerja yang melebihi target.

Tingkat efisiensi yang tinggi ini mencerminkan optimalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya dalam upaya pemulihan ekosistem dan pengendalian dampak perubahan iklim. Keberhasilan ini juga didukung oleh sinergi antar perangkat daerah, pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan direplikasi pada program-program lainnya, dengan tetap memastikan bahwa kualitas hasil tetap terjaga serta memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.

3.2.3 Sasaran 3 Pemenuhan Infrastruktur strategis dan Fasilitas Layanan dasar Publik

Di Tahun 2025 capaian sasaran ini masih sama dengan tahun 2024, belum dapat diukur karena belum tersedianya data realisasi atas indikator Pemenuhan Layanan Infastruktur Dasar dan Kewilayahan

Pengukuran kinerja dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Sasaran 3

Pemenuhan Infrastruktur strategis dan Fasilitas Layanan dasar Publik							
Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD(2026)	Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Persen	N/A	72,45	N/A	-	73,00	-

3.2.4 Sasaran Strategis 4. Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah.

Sasaran ke-4 merupakan bagian dari upaya strategis dalam mewujudkan tujuan kedua yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026, yaitu " Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan tiga indikator kinerja utama, yaitu Laju pertumbuhan ekonomi, Presentase status desa mandiri, dan PDRB perkapita. dengan tingkat capaian kinerja mencapai 192,63%, yang masuk dalam kategori Tinggi. Hasil pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah. dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel berikut:

Tabel 3.12 Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah.

Tumbuhnya Ekonomi Desa dan Daerah berbais keunggulan kompratif Daerah							
Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD(2026)	Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.17	4,75	4,17*)	87,79	5,10	81,76
Persentase status Desa Mandiri	Persen	28,45	13,82	44,44	321,56	14,63	303,76
PDRB Per kapita	Ribuan Rupiah	19.588	19.657	33.24	169,10	20.236	164
Rata-Rata Capaian					**169,83**		

*) *Data Tahun 2024 - Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Gorontalo Utara , 2025*

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan aktivitas perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Data pertumbuhan ekonomi daerah bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik.

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar **4,17 persen**. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu sebesar **4,75 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai sekitar **87,79 persen** dari target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan, antara lain penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah grafik yang menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2023 hingga 2025 di Kabupaten Gorontalo Utara.

Grafik 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023-2025



Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil namun mengalami sedikit perlambatan. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,62 persen, kemudian pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 4,30 persen, dan pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan tipis menjadi 4,17 persen.

Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi daerah masih berada pada kondisi pertumbuhan positif, yang menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Gorontalo Utara tetap berkembang. Pertumbuhan

tersebut didukung oleh kontribusi beberapa sektor ekonomi utama, terutama sektor pertanian, perdagangan, serta jasa-jasa, yang masih menjadi penopang utama struktur perekonomian daerah.

Adapun perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain fluktuasi harga komoditas pertanian dan perikanan, terbatasnya investasi di beberapa sektor produktif, serta dinamika kondisi perekonomian nasional yang turut memengaruhi kinerja ekonomi daerah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di beberapa wilayah juga menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus melakukan berbagai upaya strategis, antara lain melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peningkatan investasi daerah, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

b. Persentase status Desa Mandiri

Indikator Persentase Status Desa Mandiri merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kemandirian desa yang dinilai berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Desa dengan status mandiri menunjukkan kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang baik.

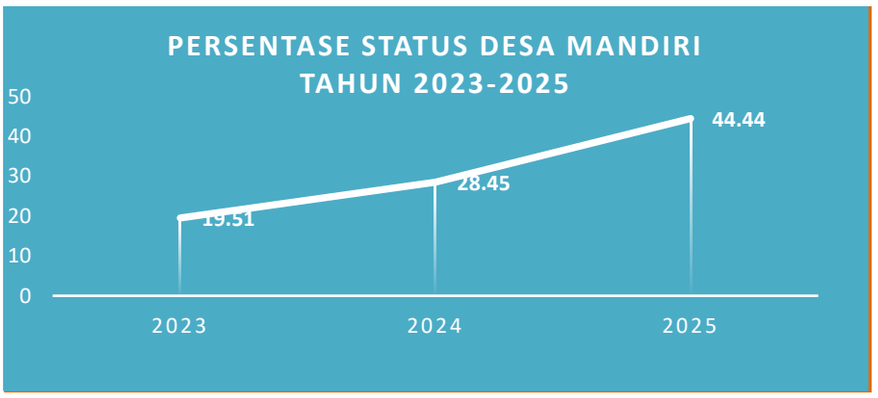
Pada tahun 2025, persentase desa mandiri di Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar 44,44 persen, meningkat signifikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 19,588 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPD sebesar 13,82 persen, maka capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan yakni 321,56 Persen.

Peningkatan yang cukup signifikan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan desa di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penguatan ekonomi masyarakat desa, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Berbagai program pembangunan desa, seperti pemanfaatan dana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan infrastruktur dasar desa turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

Persentase status Desa Mandiri di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024

yaitu sebesar 28,45 persen naik menjadi 8,94 Poin dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 19,51. Berikut disajikan grafik target dan realisasi indikator Persentase Status Desa mandiri sejak tahun 2023-2025 :

Grafik 3.4 Persentase Status desa Mandiri Tahun 2023-2025



- **Faktor Pendorong Peningkatan Desa Mandiri** :

1. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

   Pemanfaatan dana desa yang lebih terarah pada pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal memberikan dampak positif terhadap peningkatan status desa. Pada tahun 2025, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Kabupaten Gorontalo Utara mencapai sekitar Rp731,47 miliar yang disalurkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan desa. Dana tersebut mencakup beberapa jenis transfer seperti:

   - Dana Alokasi Umum (DAU)
   - Dana Alokasi Khusus (DAK)
   - Dana Bagi Hasil (DBH)
   - Dana Desa

   Besaran dana desa yang diterima setiap desa berbeda-beda tergantung pada:

   - Jumlah penduduk
   - tingkat kemiskinan
   - luas wilayah
   - kinerja desa

2. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa.

   Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa mendorong meningkatnya kualitas tata kelola desa.

3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal.

   Pengembangan usaha ekonomi desa seperti BUMDes, usaha pertanian,

perikanan, dan usaha mikro masyarakat desa turut meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

4. Peningkatan Infrastruktur Dasar Desa.

   Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, sarana air bersih, dan fasilitas pelayanan dasar turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Gambar 3.4

Musyawarah Penyertaan Modal BUMDESS Tahun 2025



Laporan Pertanggung Jabawan Tahun 2025



➢ **Faktor Penghambat Pengembangan Desa Mandiri.**

Meskipun terjadi peningkatan signifikan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di sebagian desa.
- Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi desa di beberapa wilayah.
- Keterbatasan akses pasar bagi produk unggulan desa.
- Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi desa yang masih perlu ditingkatkan.

c. Indikator Kinerja PDRB per kapita

Realisasi PDRB per kapita Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat sebesar Rp33,24 juta per kapita, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPD sebesar Rp19,657 juta per kapita. Perbedaan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh adanya pembaruan seri data PDRB yang dirilis oleh BPS, sehingga nilai PDRB per kapita mengalami penyesuaian dibandingkan dengan asumsi yang digunakan pada saat penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Grafik 3.5 Target dan Realisasi PDRB per kapita Tahun 2025



Capaian kinerja strategi Tumbuhnya ekonomi desa dan daerah berbasis keunggulan komparatif daerah dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi , Persentase status “Desa Mandiri” dan PDRB per kapita. merupakan salah satu tolak ukur pencapaian indikator kinerja Tujuan ke 2 yaitu “Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan” sebagai berikut:

Tabel 3.13 Tabel Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	200.000.000	200.000.000	100 %
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.170.712.241	2.064.234.121	95,09 %
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	66.000.000	65.760.000	99,63 %
4.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	21.000.000	15.150.000	72,14 %
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	-	-
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	-	-
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	23.600.000	23.600.000	100 %
8.	Program Pengembangan UMKM	20.000.000	-	-
9.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3.300.000	-	-
10.	Program Promosi Penanaman Modal	3.000.000	3.000.000	100 %
11.	Program Pengendalian	62.760.421	54.533.000	86,89%

	Pelaksanaan Penanaman Modal			
12.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	-	-	-
13.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	113.370.000	99.778.000	88,01%
14.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	228.087.200	220.417.760	96,63%
15.	Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-
16.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	62.925.000	56.939.500	90.49 %
Jumlah		**2.974.754.862**	**945.601.381**	**31.79 %**

Tabel 3.14 Tabel Efisiensi sasaran 4

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Tumbuhnya Ekonomi Desa dan Daerah Berbasis Keunggulan Komparatif Daerah.	• Laju Pertumbuhan Ekonomi • Persentase Status Desa Mandiri • PDRB Per Kapita	169,83 %	31,79 %	21,63 %

Pencapaian sasaran strategis *"Tumbuhnya Ekonomi Desa dan Daerah Berbasis Keunggulan Komparatif Daerah"* pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Hal ini tercermin dari capaian kinerja sebesar **169,83%**, yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara signifikan, terutama melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah, pengembangan sektor pertanian, perikanan, serta penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Di sisi lain, capaian anggaran pada sasaran ini tercatat sebesar **31,79%**, yang relatif rendah dibandingkan dengan capaian kinerja. Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar **534%**. menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang sangat tinggi dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang jauh lebih rendah dari yang direncanakan. Kondisi ini mencerminkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Efisiensi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sinergi program lintas sektor, serta adanya dukungan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun demikian, capaian anggaran yang relatif rendah juga perlu menjadi perhatian, karena dapat mengindikasikan adanya kegiatan yang belum terlaksana secara optimal atau penyerapan anggaran yang belum maksimal. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tetap selaras dengan pencapaian kinerja yang tinggi.

3.2.5 Sasaran Stategis 5. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Agalitas Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah, yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pasar tenaga kerja mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia. Semakin rendah nilai TPT maka semakin baik kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah, karena menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi produktif.

Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar 3,05 persen. Angka ini menggambarkan bahwa dari seluruh angkatan kerja yang ada, masih terdapat sebagian kecil penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di daerah ini mencapai sekitar 75.938 orang, dengan 73.621 orang di antaranya telah bekerja, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Selanjutnya, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di daerah.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan kerja dan Agalitas Tenaga Kerja mencapai 69 %. Dan termasuk pada kategori **Sedang,** Hasil Pengukuran kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kesempatan kerja dan Agalitas Tenaga Kerja sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan kerja dan Agalitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Kesempatan kerja dan Agalitas Tenaga Kerja							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi Tahun 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,79	2,1	3,05	69	2.00	65,57

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Gorontalo Utara , 2025

Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar **3,05 persen**. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan TPT tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat angkatan kerja yang belum sepenuhnya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan angkatan kerja baru yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan kesempatan kerja, terbatasnya peluang kerja di sektor formal, serta adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, dinamika perkembangan ekonomi daerah juga turut mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Beberapa sektor ekonomi yang menjadi penopang utama perekonomian daerah belum sepenuhnya mampu menyerap tambahan tenaga kerja secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan sektor-sektor ekonomi produktif berbasis potensi unggulan daerah.

Peningkatan tingkat pengangguran terbuka ini berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, meningkatnya beban ketergantungan ekonomi, serta berkurangnya optimalisasi potensi sumber daya manusia yang seharusnya dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan tingkat pengangguran, antara lain melalui peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja berbasis potensi unggulan daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Dengan upaya tersebut diharapkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gorontalo Utara dapat ditekan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang.

Gambar 3.5

Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berbasis Kompetensi Kecamatan Biau. Kabupaten Gorontalo Utara.





Grafik 3.6 Target dan Realisasi Tingkat Penagguran Terbuka Tahun 2023-2025



Peningkatan tingkat pengangguran terbuka ini berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, meningkatnya beban ketergantungan ekonomi, serta berkurangnya optimalisasi potensi sumber daya manusia yang seharusnya dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan tingkat pengangguran, antara lain melalui peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja berbasis potensi unggulan daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Dengan upaya tersebut diharapkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gorontalo Utara dapat ditekan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang.

Sasaran Meningkatnya Kesempatan kerja dan Agalitas Tenaga Kerja dengan Indikator Tingkat Pengangguran di capai melalui Program sebagai berikut :

Tabel 3.16 Tabel Program dan Anggaran sasaran 5

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Pelatihan Kerja	213.083.958	200.353.770	94,02 %
2.	Program Penempatan Tenaga kerja	-	-	-
3.	Program Hubungan Industrial	1.008.000.000	1.008.000.000	100%
4.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	50.000.000	49.953.570	99,87 %
5.	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100.000.000	100.000.000	100%
	Jumlah	**870.999.990**	**1.371.083.958**	**98,47**

Tabel 3.17 Tabel Efisiensi sasaran 5

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Meningkatnya Kesempatan kerja dan Agalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	69 %	98,47%	70,1 %

Pencapaian sasaran strategis *"Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Agilitas Tenaga Kerja"* pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan hasil, meskipun belum optimal. Hal ini tercermin dari capaian kinerja sebesar 69%, yang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian anggaran pada sasaran ini mencapai 98,47%, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah dilaksanakan secara hampir maksimal. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian kinerja, kondisi ini menghasilkan tingkat efisiensi **70,1%** menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang tinggi belum sepenuhnya mampu menghasilkan capaian kinerja yang sebanding. Dengan kata lain, pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini masih **belum efisien.**

3.2.6 Sasaran Stategis 6. Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Perlindungan Sosial.

Sasaran strategis **"**Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial**"** merupakan salah satu fokus

pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sasaran ini diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.

Pengukuran keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan melalui beberapa indikator kinerja utama, yaitu Persentase Penduduk Miskin, Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan, Indeks Ketahanan Pangan, dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem. Keempat indikator tersebut menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara komprehensif, baik dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat, kecukupan konsumsi, ketahanan pangan daerah, maupun tingkat kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.

Indikator Persentase Penduduk Miskin menggambarkan proporsi penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan menjadi salah satu ukuran utama dalam melihat keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Sementara itu, Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan mencerminkan tingkat daya beli masyarakat serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Semakin tinggi nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Indeks Ketahanan Pangan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ketersediaan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Indeks ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menjamin kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, Tingkat Kemiskinan Ekstrem menggambarkan kondisi masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah dan membutuhkan perhatian khusus melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial ini mencapai hasil rata0rata 100,24 %. Dan termasuk pada Sangat Tinggi . Hasil Pengukuran kinerja pada Sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial

Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Persentase Penduduk Miskin	Persen	16,86	16,25	15,89	102	15,90	99,93
Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Ribu Rupiah	10.476	10.580	10.678	100,92	10.780	99,05
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,88	80,00	66,59	83,23	80,00	80,00
Tingkat Kemiskinan ekstrem	Persen	N/A	4,25	N/A	-	4,00	-
Rata-rata Capaian					81,3		

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Gorontalo Utara , 2025

A. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta keberhasilan pembangunan daerah dalam menekan kemiskinan. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar 15,89 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,97 persen poin dibandingkan tahun 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penurunan tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2025 tercatat sekitar 17,90 ribu orang, atau menurun sekitar 1,09 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peningkatan garis kemiskinan yang mencapai sekitar Rp424.573 per kapita per bulan menunjukkan adanya peningkatan standar kebutuhan minimum masyarakat. Meskipun garis kemiskinan meningkat, persentase penduduk miskin tetap mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi indikator ini lebih baik dari target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara berjalan dengan cukup efektif. Dengan realisasi sebesar 15,89 persen, capaian kinerja indikator ini mencapai sekitar 102,27 persen dari target,

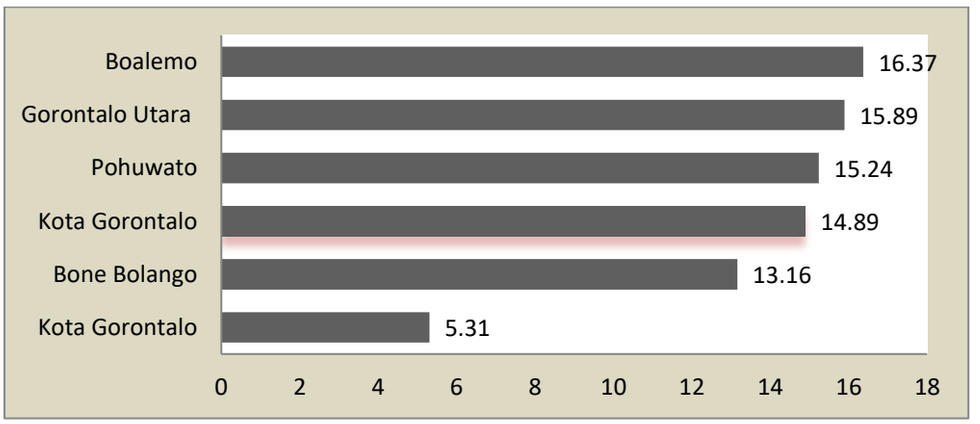
yang berarti target kinerja berhasil terlampaui. Berikut dapa di lihat pada grafik.

Grafik 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase Penduduk Miskin



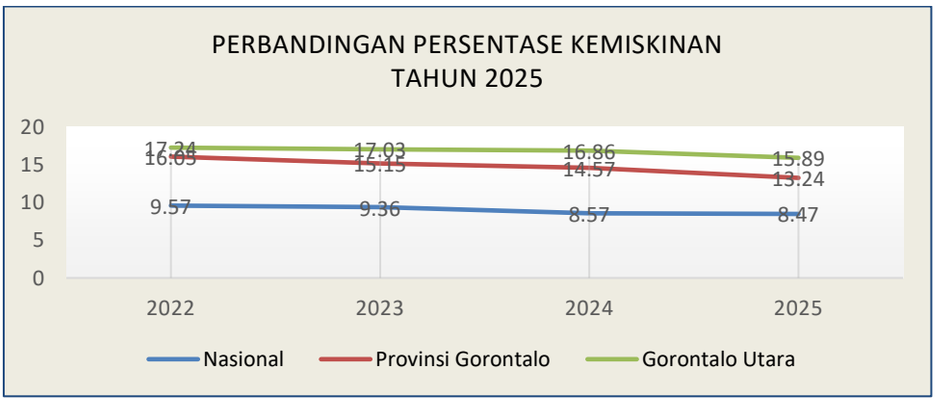
Berikut perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

Grafik 3.8 Perbandingan Persentase Kemiskinan
se-Provinsi Gorontalo Tahun 2025



Sumber Data: Badan Pusat statistik Provinsi Gorontalo,2025

Grafik 3.9 Perbandingan Persentase kemiskinan dengan Capaian nasional dan Provinsi Gorontalo



Sumber Data : Badan Pusat statistic Kab. Gorontalo Utara , 2025

- **Faktor keberhasilan** :

1. Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial.

   Program bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah berjalan dengan baik, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program tersebut membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

2. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

   Pemerintah daerah mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha produktif, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan usaha.

3. Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

   Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk kegiatan padat karya, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa dan membuka lapangan pekerjaan sementara bagi masyarakat.

4. Meningkatnya Akses terhadap Layanan Dasar.

   Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pengurangan angka kemiskinan.

5. Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan.

   Adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sehingga program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

Berikut beberapa contoh foto kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara yang bisa Anda gunakan sebagai lampiran dokumentasi dalam laporan LKIP atau laporan kinerja tahun 2025.

Gambar 3.6

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di beberapa desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli masyarakat. Pendampingan juga dilakukan oleh aparat desa dan pihak keamanan agar penyaluran bantuan berjalan tertib dan tepat sasaran





Gambar 3.7

Penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako dan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan ini disalurkan melalui program pemerintah daerah dan dukungan berbagai pihak guna membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat





B. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan

Indikator Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa. Semakin tinggi nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Pada tahun 2025, target indikator Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan di Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan sebesar 10.580,

sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 10.678. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai sekitar 100,93 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, yang mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Peningkatan nilai pengeluaran per kapita riil ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya.

Grafik 3. 10 Target dan Realisasi pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan Tahun 2025

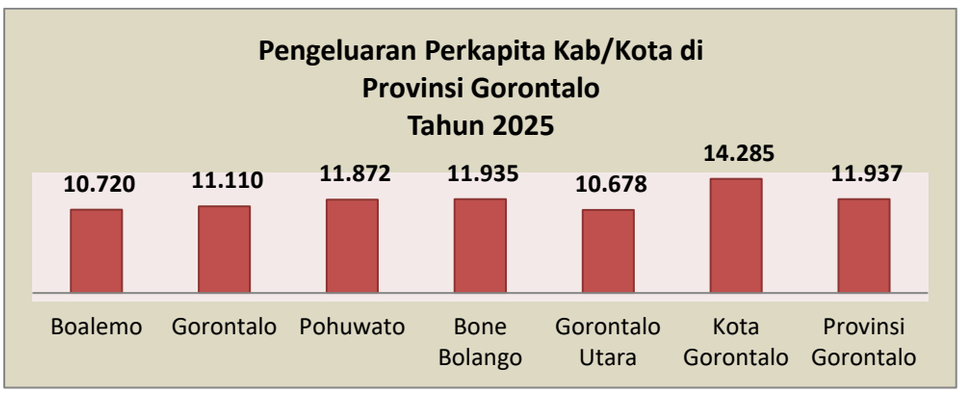


Sumber :BPS Kab.Gorontalo Utara, 2025

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pengeluaran perkapita antara kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, maka pengeluaran perkapita Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 berada di urutan ke tujuh atau paling di bawah yakni berada di angka 10.678.000.

Perbandingan pengeluaran perkapita yang telah di sesuaikan antara kabupaten/kota di provinsi Gorontalo pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.11 Pengeluaran Perkapita
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo



Sumber : BPS Kab.Gorontalo Utara, 2025

❖ **Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran**

Rendahnya pengeluaran per kapita tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor struktural ekonomi daerah.

1) Struktur perekonomian Kabupaten Gorontalo Utara masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi skala kecil yang memiliki tingkat produktivitas dan nilai tambah relatif rendah. Hal ini berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat yang belum optimal sehingga kemampuan konsumsi rumah tangga juga lebih terbatas.
2) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara masih relatif tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di daerah ini tercatat sebesar 15,89 persen, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan pengeluaran di bawah rata-rata sehingga mempengaruhi nilai pengeluaran per kapita secara keseluruhan.
3) Karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan daerah perdesaan juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Di wilayah perdesaan, sebagian kebutuhan rumah tangga sering dipenuhi secara mandiri dari hasil produksi sendiri seperti hasil pertanian atau perikanan, sehingga tidak seluruhnya tercermin sebagai pengeluaran dalam bentuk uang.
4) Terbatasnya aktivitas ekonomi sektor perdagangan, industri, dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi juga menyebabkan perputaran ekonomi masyarakat relatif lebih kecil dibandingkan wilayah perkotaan seperti Kota Gorontalo.

Dengan kondisi tersebut, peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara ke depan memerlukan upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi produktif, pengembangan UMKM, peningkatan kesempatan kerja, serta percepatan pembangunan ekonomi wilayah perdesaan.

Gambar 3.8

Aktivitas nelayan di wilayah pesisir seperti Gentuma dan Ponelo Kepulauan merupakan sumber penghasilan utama masyarakat.





➢ **Hubungan dengan pengeluaran per kapita:**

- Peningkatan produksi ikan dan hasil laut dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan.
- Pendapatan yang meningkat akan berdampak pada peningkatan daya beli dan pengeluaran masyarakat.

Selain peningkatakan produksi ikan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga diarahkan pada penguatan UMKM dan ekonomi produktif masyarakat, seperti:

- Penyaluran bantuan usaha kepada pelaku UMKM.
- Pengembangan galeri pusat oleh-oleh UMKM daerah.
- Sosialisasi pembiayaan dan digitalisasi keuangan bagi peternak, nelayan, dan pelaku usaha kecil.

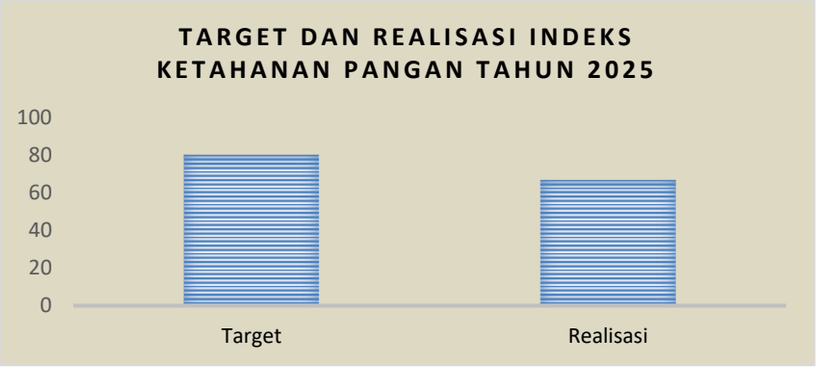
C. Indeks Ketahanan Pangan

Indikator Indeks Ketahanan Pangan merupakan salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan pembangunan pada sasaran strategis *Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial*. Indikator ini menggambarkan kondisi ketahanan pangan daerah yang mencakup aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta pemanfaatan pangan oleh masyarakat.

Pada tahun 2025, target Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan sebesar 80,00, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 66,59. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 83,23 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya peningkatan ketahanan pangan terus dilakukan, namun realisasi indikator masih berada di bawah target yang direncanakan.

Berikut perbandingan antara target dan realisasi bisa dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.12 Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025



Belum tercapainya target Indeks Ketahanan Pangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bergizi, kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi daya beli terhadap pangan, serta masih adanya wilayah yang memiliki tingkat kerentanan pangan relatif tinggi. Selain itu, faktor produksi pangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, perubahan kondisi iklim, serta produktivitas sektor pertanian yang belum optimal juga turut mempengaruhi capaian indikator ini.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, antara lain melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, penguatan program diversifikasi pangan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kerawanan pangan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan masyarakat sehingga capaian Indeks Ketahanan Pangan dapat terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Grafik 3.13 Indeks Ketahanan Pangan Nasional dan provinsi Gorontalo



Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Pencapaian sasaran diatas tidak terlepas dari intervensi pemerintah daerah melalui program dan kegiatan. Adapun program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program pemberdayaan sosial	173.674.246	172.993.580	99,60
2.	Program Rehabilitas Sosial	125.169.530	122.874.899	98,16
3.	Program perlindungan dan jaminan Sosial	53.552.850	53.193.323	99,32
4.	Program Penanganan Bencana	82.499.505	72.084.000	87,37
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-	-
6	Program Peningkatakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	159.000.000	156.846.240	98,55
7.	Program Penanganan Kerawangan Pangan	245.350.000	206.141.878	84,02
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	-
9.	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	163.755.710	153.536.000	94
10.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	22.950.000	20.702.610	90,21
11.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	461.003.525	385.020.050	83,05
12.	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian (Dinas Peternak an dan Kesehatan Hewan)	73.291.900	46.064.800	62,85
13.	Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian	143.505.600	138.299.600	94,04
14.	Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	455.713.900	423.288.200	92,9
12.	Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Peternak an dan Kesehatan Hewan)	10.000.000	5.400.000	54,00

13.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	155.670.860	153.199.400	98,41
14.	Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	-
15	Program Peningkatan Distribusi Sarana Perdagangan	80.237.354	80.184.000	99,93
16	Program standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	-	-
17.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	396.250.400	3.918.619	99,66
18.	Program Pengelolaan Perikanan dan Budidaya	-	-	-
	Total	**2.801.652.380**	**2.193.747.199**	**78,30**

Tabel 3. 20 Tabel Efisiensi sasaran 6

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	• Persentase penduduk miskin • Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan • Indeks Ketahanan Pangan • Tingkat kemiskinan ekstrem	81, 3 %	78,30 %	103,8 %

Pencapaian sasaran strategis *"Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial"* pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja sebesar 81,3%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 78,30%. Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 103,8**%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja yang relatif optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa alokasi dan pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung upaya pengurangan ketimpangan serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial masyarakat. Efisiensi ini juga mencerminkan adanya sinergi yang baik antar perangkat daerah, optimalisasi program prioritas, serta peningkatan kualitas

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3.2.7 Sasaran Strategis 7. Menguatnya Daya Saing Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan

Sasaran strategis *"Menguatnya Daya Saing Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan"* diukur melalui indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekosistem inovasi dan investasi.

Pada tahun 2025, pencapaian indikator ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai program strategis, antara lain penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pengembangan UMKM, serta dorongan terhadap inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran strategis *Menguatnya Daya Saing Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan* mencapai 119 %. Dan termasuk pada kategori Sangat Tinggi, Hasil Pengukuran kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kesempatan kerja dan Agalitas Tenaga Kerja sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi Pembangunan

Menguatnya daya saing daerah melalui inovasi dan kolaborasi Pembangunan							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,34	2,85	3,40	119	3,00	113

Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,85, realisasi yang dicapai adalah 3,40, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 119%. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing daerah mengalami peningkatan yang signifikan dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Indeks Daya Saing

Daerah pada tahun 2024 sebesar 3,34, sehingga pada tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 3,40. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan pada berbagai aspek pembentuk daya saing, seperti penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berkembangnya aktivitas ekonomi dan iklim investasi di daerah. Peningkatan ini juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dan kolaborasi pembangunan, termasuk melalui penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan konektivitas dan pelayanan publik.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi daya saing daerah, dilakukan perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat tingkat capaian relatif Kabupaten Gorontalo Utara dibandingkan dengan daerah lain, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan dan potensi peningkatan daya saing ke depan. Berikut gambar IDSD tahun 2025 Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo :

Gambar 3.9 Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2025

PROVINSI GORONTALO



3,58
SKOR IDSD 2025
PROVINSI GORONTALO



2
kab/kota
≥ skor provinsi

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,30	3,37	3,68	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	3,50
PROV. GORONTALO	4,68	2,90	3,49	4,00	3,67	3,93	3,49	3,38	3,16	3,81	2,64	3,78	3,58
RATA-RATA KAB/KOTA	4,75	2,95	4,06	3,80	3,66	4,22	3,28	3,67	2,38	3,80	3,47	2,62	3,55
BOALEMO	4,66	2,65	3,90	3,58	3,76	4,04	2,90	3,39	1,57	3,69	3,26	1,28	3,22
GORONTALO	4,81	2,96	4,18	3,89	3,60	4,18	3,17	3,31	2,83	4,12	2,92	3,53	3,63
POHUWATO	4,53	2,46	3,55	3,65	3,35	4,17	2,41	3,63	2,47	3,82	4,26	2,03	3,36
BONE BOLANGO	4,82	3,12	3,59	3,78	3,71	4,40	3,50	3,80	1,72	3,66	3,32	2,22	3,47
GORONTALO UTARA	4,89	3,00	4,15	3,76	3,50	4,22	2,72	3,18	1,81	3,52	3,77	2,31	3,40
KOTA GORONTALO	4,78	3,49	4,97	4,11	4,05	4,33	5,00	4,68	3,88	3,96	3,28	4,32	4,24

Keterangan : Pilar 1 Institusi; Pilar 2 Infrastruktur; Pilar 3 Adopsi TIK; Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro; Pilar 5 Kesehatan; Pilar 6 Keterampilan; Pilar 7 Pasar Produk; Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja; Pilar 9 Sistem Keuangan; Pilar 10 Ukuran Pasar; Pilar 11 Dinamika Bisnis; Pilar 12 Kapabilitas Inovasi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo, capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 sebesar 3,40 menunjukkan posisi yang berada pada kelompok menengah. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi (3,58) dan rata-rata kabupaten/kota (3,55), serta lebih rendah dibandingkan daerah dengan kinerja tinggi seperti Kota Gorontalo yang mencapai 4,24 dan Kabupaten Gorontalo sebesar 3,63.

Namun demikian, posisi Kabupaten Gorontalo Utara masih relatif lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Boalemo yang mencatat nilai 3,22. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Pohuwato (3,36), capaian Gorontalo Utara sedikit lebih tinggi, yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam peningkatan daya saing daerah.

Posisi ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Gorontalo Utara telah mengalami kemajuan, namun masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah yang memiliki tingkat daya saing lebih tinggi di provinsi. Beberapa aspek yang masih perlu diperkuat antara lain:

- peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
- penguatan pasar tenaga kerja dan keterampilan SDM
- pengembangan ekosistem inovasi dan dinamika bisnis

Capaian IDSD Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 mencerminkan kondisi daya saing yang cukup kompetitif namun belum optimal, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan posisi daerah di tingkat Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan faktor-faktor utama pembentuk daya saing, meliputi peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan inovasi dan tata kelola pemerintahan.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan pelaku usaha dan UMKM, peningkatan kompetensi tenaga kerja, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh program yang dilaksanakan berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang terarah dan kolaboratif, diharapkan berbagai upaya tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.





Pemerintah kabupaten gorontalo utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Melalui Musrenbang RPJMD ini, diharapkan tersusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. forum ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi dan kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan Gorontalo Utara yang berdaya, sinergis, ceria, dan sejahtera.

Gambar 3.10 Kegiatan pengawasan kelaikan jalan (KIUR)





Kegiatan pengawasan kelaikan jalan (KIUR) berperan langsung dalam:

1. Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas seperti distribusi barang dan mobilitas manusia lebih efisien.
2. Menunjang keselamatan dan kenyamanan masyarakat yakni meningkatkan kualitas hidup dan reputasi daerah.
3. Mendukung efisiensi anggaran dan perencanaan strategis dalam optimalisasi sumber daya yang memiliki dampak positif pada indeks daya saing daerah (IDSD).

Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik yang bersifat pendukung maupun yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. salah satu faktor pendukung yakni Penguatan Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan. Perencanaan yang lebih terarah melalui Musrenbang, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang baik, mendukung efektivitas pelaksanaan program, selain itu Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan juga merupakan faktor peningkatan dari naiknya indeks daya saing daerah, Adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan turut mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis *"Menguatnya Daya Saing Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan"*, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan keunggulan kompetitif daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.22 program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	992.422.332	977.133.703	98,46
2.	Program pengelolaan Pelayanan	-	-	-
3.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
4.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	316.787.600	295.872.000	93,40
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	268.705.780	75.817.340	28,22
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	343.997.978	256.436.131	74,55
	Total	**1.921.913.690**	**1.605.259.174**	**83,52**

Tabel 3.23 Tabel Efisiensi sasaran 7

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Menguatnya Daya Saing Daerah Melalui Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	119 %	83,52 %	142,4 %

Pencapaian sasaran strategis “Menguatnya Daya Saing Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan” pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari capaian kinerja sebesar 119%, yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan, sementara capaian realisasi anggaran tercatat sebesar 83,52%. Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 142,4%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja yang optimal bahkan melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi pelaksanaan program berbasis inovasi dan kolaborasi telah berjalan secara efektif, didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan, optimalisasi sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran. Efisiensi ini juga menunjukkan bahwa berbagai intervensi pembangunan yang dilakukan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah. Namun demikian, ke depan perlu dilakukan penguatan pada aspek perencanaan dan penganggaran agar keselarasan antara target kinerja dan alokasi anggaran dapat lebih optimal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberhasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.2.8 Sasaran Strategis 8. Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi

Sasaran strategis *“Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi”*, yang merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo Utara. Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong peningkatan budaya literasi sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Dimensi Pendidikan dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yang mencerminkan

tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses, kualitas, dan partisipasi pendidikan, serta penguatan budaya membaca dan literasi di masyarakat. Berikut tabel pengukuran Capaian sasaran ke 8 :

Tabel 3.24 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi

Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Indeks Dimensi Pendidikan	Poin	9,95	9,831	9,95 *)	101	9,837	101
Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	98	74,1	0,74	0,99	74,15	0,99
Rata-rata Capaian					**51,0**		

*) Tahun 2024

Pada indikator Indeks Dimensi Pendidikan, target tahun 2025 sebesar 9,831 dengan realisasi mencapai 9,95, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 101%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada sektor pendidikan telah melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 9,95, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga pada level yang baik dan stabil. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 9,837, capaian tahun 2025 juga telah melampaui target dengan capaian sebesar 101%.

Sementara itu, pada indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, target tahun 2025 sebesar 74,1, dengan realisasi sebesar 0,74 atau capaian sebesar 0,99%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator literasi masyarakat masih jauh dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 98, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 74,15, capaian yang diperoleh masih sangat rendah, yaitu sebesar 0,99%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 51,0%, yang menunjukkan bahwa pencapaian sasaran masih berada pada kategori cukup rendah dan memerlukan perhatian khusus, terutama pada indikator literasi masyarakat yang menjadi faktor utama rendahnya capaian.

a. Indeks Dimensi Pendidikan

Indikator Indeks Dimensi Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 9,831, realisasi yang dicapai adalah 9,95, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 101%. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan di daerah telah mampu melampaui target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga sebesar **9,95**, capaian pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada level yang tinggi. Hal ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain peningkatan akses layanan pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan program peningkatan kualitas tenaga pendidik. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan pendidikan yang merata juga turut mendorong peningkatan capaian indikator ini.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar **9,837**, capaian tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar **101%**, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan sektor pendidikan berada pada jalur yang sangat baik.

❖ **Faktor Keberhasilan :**

1. Pemerintah daerah terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.
2. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah turut meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
3. Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan.
4. Adanya bantuan pendidikan dan program afirmasi bagi masyarakat kurang mampu membantu meningkatkan partisipasi sekolah.
5. Perencanaan dan pengendalian program pendidikan yang lebih baik meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

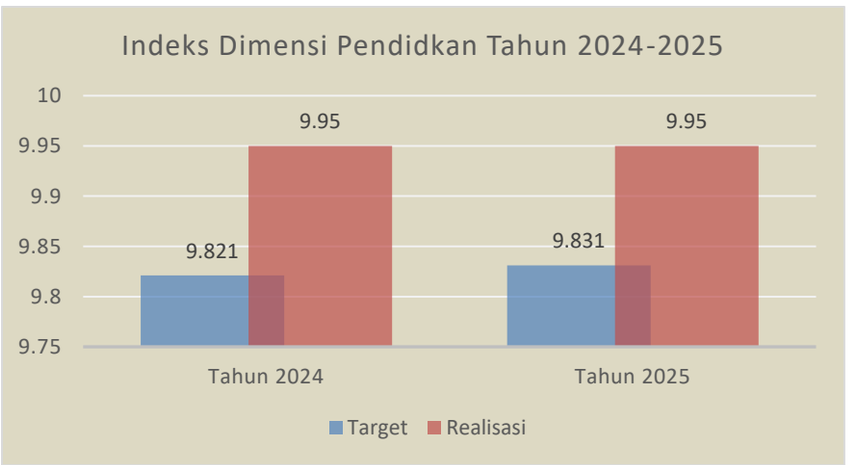
Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tidak hanya fokus pada akses, tetapi juga pada mutu pembelajaran dan hasil pendidikan.
2. Menyesuaikan kurikulum dan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman.
3. Memastikan seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, mendapatkan

layanan pendidikan yang setara.

4. Mendorong digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan
5. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pendidikan.

Grafik 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Dimensi Pendidikan Tahun 2024-2025



Dengan capaian yang telah melampaui target, Indeks Dimensi Pendidikan menjadi indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo Utara. Ke depan, upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan perlu terus diperkuat agar memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

b. Indeks pembangunan Literasi Masyarakat

Capaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang masih perlu mendapat perhatian. Dari target yang ditetapkan sebesar 74,1, realisasi yang dicapai adalah sebesar 0,74, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 0,99%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 98, capaian tahun 2025 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 74,15, capaian tahun 2025 masih jauh di bawah target yang diharapkan.

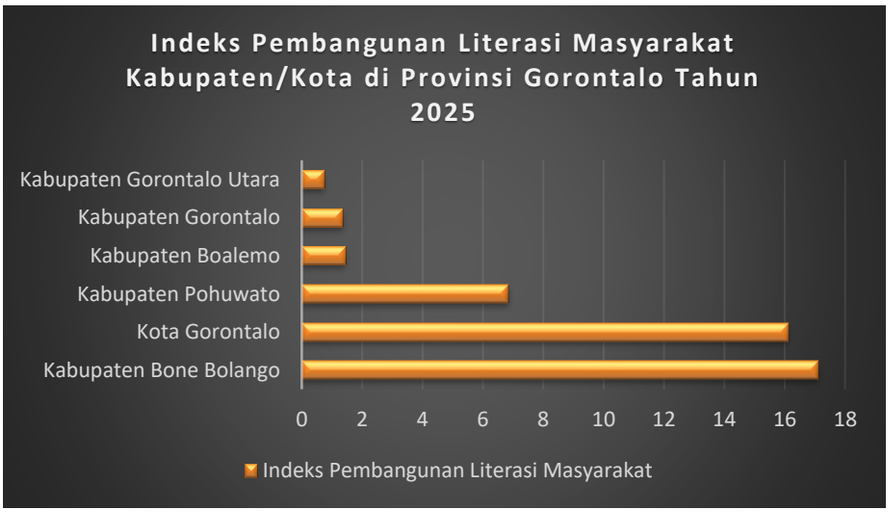
Rendahnya capaian indikator ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan literasi masyarakat masih belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh masih rendahnya minat baca masyarakat, keterbatasan akses terhadap bahan bacaan dan fasilitas literasi, serta belum optimalnya pelaksanaan program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya mendorong peningkatan budaya literasi melalui berbagai program, seperti pengembangan

perpustakaan daerah dan desa, penyediaan bahan bacaan, serta pelaksanaan kegiatan literasi berbasis masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

Berikut perbandingan Indeks pembangunan Literasi Masyarakat dengan kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo :

Grafik 3.15 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2025



Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan capaian yang masih berada di posisi paling bawah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya-upaya peningkatan literasi, seperti penguatan program perpustakaan desa, pelatihan literasi untuk masyarakat, dan kegiatan pembiasaan membaca, capaian di Gorontalo Utara masih belum mampu menyaingi kabupaten/kota lainnya yang lebih dahulu memfokuskan program literasi secara intensif.

Meski berada di posisi terendah, capaian ini menjadi titik pijak yang penting untuk perbaikan dan inovasi program literasi di masa mendatang. Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi literasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perpustakaan, memperluas akses kegiatan literasi masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, komunitas, hingga organisasi non-pemerintah.

❖ **Faktor yang Mempengaruhi Capaian**

- Faktor Penghambat :
  1. Minat baca masyarakat masih terbatas, sehingga pemanfaatan bahan bacaan dan fasilitas literasi belum optimal.
  4. Ketersediaan perpustakaan, taman baca, dan akses bahan bacaan

yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah desa.

5. Pelaksanaan program literasi belum terintegrasi secara menyeluruh dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
6. Kapasitas tenaga pengelola perpustakaan dan pegiat literasi masih perlu ditingkatkan.
7. Pemanfaatan teknologi informasi belum diimbangi dengan literasi digital yang baik, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi.

Untuk meningkatkan capaian indikator literasi masyarakat ke depan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mendorong program literasi berbasis komunitas seperti taman baca, pojok literasi, dan gerakan membaca di desa.
2. Menambah dan memperbaiki fasilitas perpustakaan serta akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas.
3. Mengintegrasikan program literasi dengan sektor pendidikan, desa, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Melakukan pelatihan bagi pengelola perpustakaan dan pegiat literasi agar lebih profesional dan inovatif.
5. Mengembangkan literasi digital melalui platform online, e-library, dan media pembelajaran berbasis teknologi.

Dalam rangka mendorong peningkatan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara secara konsisten melakukan berbagai upaya terintegrasi yang diarahkan pada perluasan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta penguatan budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan yang lebih merata.

Gambar 3.11

Pengadaan Alat Pembelajaran PAUD/TK



Kesiapan satuan pendidikan PAUD untuk diakreditasi yang didukung oleh system akreditasi yang selaras dengan target kinerja rapor Pendidikan



Gambar 3.12 Bantuan beasiswa bagi pendidik



Pengadaan Marching Band PAUD / TK



Gambar 3.13 Sekolah Kesetaraan Paket A/B/C Tahun 2025



Gambar 3.14

Bupati Thariq Kukuhkan Bunda Literasi, Gerakan Semangat Membaca di Gorut



SMAN 3 Gorontalo Utara Terapkan Program "Literasi 15 Menit" untuk Tingkatkan Budaya Membaca



Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis *Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi*, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2025 telah mengimplementasikan berbagai program yang dirancang secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Program-program tersebut difokuskan pada upaya memperluas akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan minat baca dan budaya literasi sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Tabel 3.25 Program dan Anggaran 8 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program pengelolaan pendidikan	36.818.880.961	36.364.656.362	98,77
2.	Program Pengembangan Kurikulum	-	-	-
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	369.687.806	365.019.187	98,73
	Program Pembinaan Perpustakaan	403.475.000	351.057.324	87
Total		**37.592.043.767**	**37.080.732.873**	**97 %**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis *Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi* pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 37.080.732.873 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 37.592.043.767, atau dengan tingkat penyerapan mencapai 97 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien, dengan tingkat optimalisasi penggunaan anggaran yang sangat tinggi.

Tabel 3.26 Tabel Efisiensi sasaran 8

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi	• Indeks dimensi Pendidikan • Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	51,0 %	97 %	52,58 %

Tingkat efisiensi pada sasaran strategis *Tercapainya Kesempatan Pendidikan yang Egaliter dan Akselerasi Budaya Literasi* di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 tercatat sebesar 52,58 persen, yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja sebesar 51,0 persen dengan capaian anggaran sebesar 97 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan keterkaitan yang lebih optimal antara penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai. Tingginya realisasi anggaran menjadi indikator kuat bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, tingkat efisiensi tersebut juga mencerminkan adanya peluang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan penyempurnaan dalam perencanaan berbasis kinerja, penguatan kualitas implementasi kegiatan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian, tingkat efisiensi yang dicapai pada tahun 2025 menjadi pijakan strategis untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal di masa

mendatang, sehingga pemanfaatan anggaran dapat semakin tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap pemerataan kesempatan pendidikan dan penguatan budaya literasi di masyarakat.

3.2.9 Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Pada tahun 2025, sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warganya. Peningkatan derajat kesehatan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyentuh kesehatan mental, gizi, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah utama yang bertanggungjawab secara teknis pencapaian sasaran dibidang kesehatan ini dengan mengkonsolidasikan peran semua sektor terkait hingga pada level pemerintahan desa dan masyarakat. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan indikator sasaran Prevalensi stunting dan Angka Harapan Hidup.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diperoleh rata-rata hasil capaian kinerja sasaran sebesar 168,5 % atau kategori predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Prevalensi stunting	Persen	12,06	29,1	12,52	232	29,05	43,09
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,88	66,6	70,25	105	66,75	105
Rata-rata Capaian					**168,5**		

a. Prevalensi Stunting

Indikator Prevalensi Stunting merupakan salah satu ukuran utama dalam sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Pada tahun 2025, target RPD untuk indikator ini ditetapkan sebesar 29,1, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 12,52. Jika dihitung menggunakan formula capaian standar RPD, angka capaian menunjukkan nilai sebesar 232%,

yang tampak tinggi karena mekanisme perhitungan indikator kesehatan ini bersifat invers; artinya, semakin rendah angka prevalensi stunting, semakin baik kondisi kesehatan masyarakat.

Meskipun secara persentase capaian terlihat “berlebihan”, capaian realisasi yang lebih rendah dari target ini justru menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting. Hal ini menegaskan bahwa intervensi pemerintah daerah, seperti program gizi balita, penyuluhan pola makan sehat, dan pemantauan pertumbuhan anak, memberikan dampak positif nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan capaian ini, Kabupaten Gorontalo Utara telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi stunting, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat program kesehatan anak dan keluarga agar prevalensi stunting dapat terus menurun hingga mendekati angka ideal nasional.

❖ **Faktor yang mempengaruhi turunnya Prevalensi stunting** :

1. Penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh membaiknya asupan gizi, terutama pada **1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)**. Hal ini meliputi:

a. Pemberian ASI eksklusif
b. Konsumsi makanan bergizi seimbang
c. Pemberian makanan tambahan (PMT)
d. Kepatuhan konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil

2. Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

a. Meningkatnya cakupan pelayanan di Posyandu
b. Pemantauan rutin pertumbuhan balita
c. Peningkatan kualitas layanan ibu dan anak (KIA)
d. Imunisasi dasar lengkap

3. Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih

a. Tersedianya air bersih yang layak
b. Penurunan praktik buang air besar sembarangan
c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

4. Peningkatan Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat

a. Edukasi tentang gizi seimbang dan pola asuh anak
b. Kelas ibu hamil dan kelas balita
c. Kampanye pencegahan stunting

5. Dukungan Program Perlindungan Sosial

a. Bantuan pangan dan bantuan sosial bagi keluarga miskin
b. Intervensi keluarga berisiko stunting
c. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga

Gambar 3.15





Kegiatan pelatihan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) di wilayah Puskesmas Kwandang, di mana kader kesehatan dilatih untuk memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting.

Kegiatan gizi di Gorontalo Utara, menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam program nutrisi

Gambar 3.16 Pemeriksaan Ibu hamil yang bermasalah gizi





Gambar 3. 17 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir



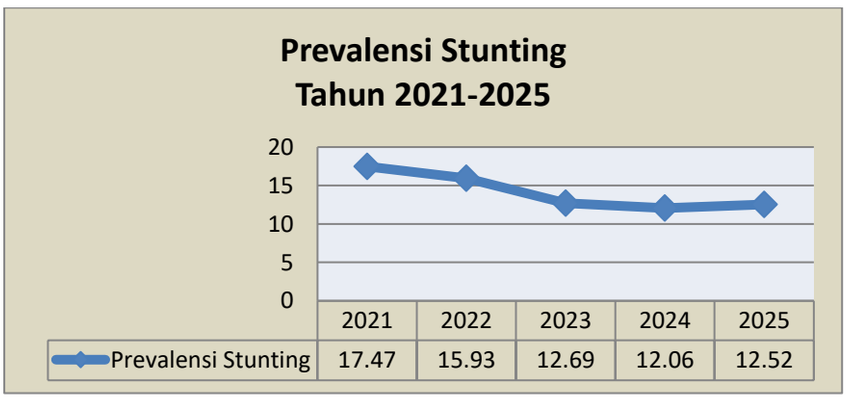


Gambar 3.18



Bupati Thariq Kukuhkan TP Posyandu 2025-2030, Optimalkan Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bupati Gorontalo Utara menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Ia berharap, dengan dikukuhkannya TP Posyandu yang baru, pelayanan di enam bidang SPM dapat ditingkatkan secara signifikan.

Grafik 3.16 Prevalensi Stunting Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2025

b. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, yang mencerminkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pada Tahun 2025, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan hidup mencapai sekitar 70,25 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,88 tahun.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan

kualitas layanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Selain itu, berbagai program intervensi pemerintah daerah, seperti penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan sanitasi lingkungan, serta upaya penurunan prevalensi stunting, turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, tren peningkatan AHH ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara telah berjalan secara konsisten dan memberikan dampak yang nyata. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan program promotif dan preventif serta peningkatan kualitas layanan kesehatan secara merata agar peningkatan Angka Harapan Hidup dapat terus berlanjut secara berkelanjutan

Angka harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, angka harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi akan sangat mempengaruhi tingginya angka harapan hidup. Program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk perilaku konsumsi dan kesehatan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih sangat menentukan derajat harapan hidup masyarakat. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 mencapai 70,25 tahun. Dan hal ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir hidup mempunyai harapan untuk bertahan hidup sampai 70,25 tahun tahun. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 1,37 poin dari tahun 2024 yaitu 68,88 tahun. Dan jika dibandingkan dengan target RPD realisasi tahun 2025 telah melampaui target yaitu capaian 105 %.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, meliputi akses dan kualitas layanan kesehatan, status gizi masyarakat, serta kondisi sanitasi dan lingkungan. Selain itu, perilaku hidup masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta dukungan program pemerintah melalui intervensi lintas sektor turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, faktor infrastruktur dan aksesibilitas wilayah juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi pemerataan layanan kesehatan. Secara keseluruhan, sinergi berbagai faktor tersebut menjadi penentu utama dalam mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup secara berkelanjutan.

Gambar 3.19 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir



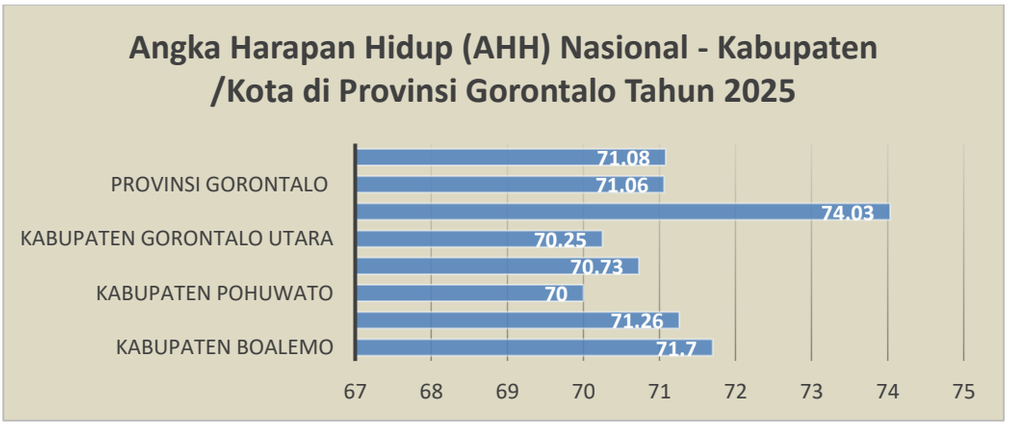






Sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat, Angka Harapan Hidup (AHH) tidak hanya dianalisis secara internal, tetapi juga dibandingkan dengan capaian daerah lain sebagai bentuk evaluasi kinerja pembangunan kesehatan. Perbandingan ini penting untuk melihat posisi relatif Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara dalam lingkup kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan serta peluang peningkatan yang dapat dilakukan ke depan. berikut Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagai berikut :

Grafik 3.17 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi gorontalo



Bps Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

Berdasarkan data Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2025, capaian AHH di Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar 70,25 tahun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 69,88 tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, posisi Kabupaten Gorontalo Utara berada pada kelompok menengah.

Secara komparatif, AHH Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di bawah beberapa daerah dengan capaian lebih tinggi, seperti Kota Gorontalo yang mencapai 74,03 tahun, Kabupaten Boalemo sebesar 71,70 tahun, serta Kabupaten Gorontalo sebesar 71,26 tahun. Namun demikian, capaian ini relatif sebanding dan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pohuwato yang berada pada angka 70,00 tahun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang mencapai 71,06 tahun, AHH Kabupaten Gorontalo Utara masih berada sedikit di bawah rata-rata tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan yang positif, masih terdapat ruang untuk penguatan pembangunan sektor kesehatan guna mengejar ketertinggalan dari daerah dengan capaian yang lebih tinggi.

Perbedaan capaian AHH antar kabupaten/kota tersebut mencerminkan adanya variasi dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Oleh karena itu, peningkatan AHH di Kabupaten Gorontalo Utara ke depan perlu difokuskan pada penguatan layanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi.

Dengan tren yang terus meningkat, capaian AHH Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan arah yang positif dan menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan, perbaikan status gizi, serta peningkatan kualitas lingkungan yang sehat. Berikut Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.28 Program dan anggaran Sasaran 9 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Pemenuhan Upaya KesehatanPerorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.457.990.240	26.487.157.512	96,46
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.983.724.000	3.876.357.992	97,31
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	255.577.599	255.279.500	99,88
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.994.248.275	18.755.902.970	89,34
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.563.040.000	8.492.487.270	99,18
6.	Program Pengendalian Penduduk	87.600.000	85.200.000	97,26
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.215.920.550	5.253.958.045	84,52
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	941.949.000	799.200.000	84,85
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	50.000.000	50.000.000	100
Total		**64.964.698.064**	**58.806.838.289**	**90,52%**

Tabel 3.29 Tabel Efisiensi sasaran 9

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	• Prevalensi stunting • Angka Harapan Hidup	168,5 %	90,52 %	186,15 %

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 186,15 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan, yaitu sebesar 168,5 persen, jauh melampaui tingkat penyerapan anggaran yang sebesar 90,52 persen.

Tingginya tingkat efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan telah berjalan sangat optimal, dengan pemanfaatan sumber daya yang mampu menghasilkan kinerja secara maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa strategi dan intervensi yang dilakukan telah tepat sasaran serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, capaian ini juga menunjukkan adanya efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, di mana alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan output dan outcome yang melebihi target yang ditetapkan. Efisiensi yang tinggi ini menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan anggaran berbasis kinerja telah berjalan dengan baik.

3.2.10 Sasaran Strategis 10. Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Sasaran strategis *Meningkatnya Pembangunan untuk Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak* di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan yang responsif gender serta berorientasi pada pemenuhan hak anak menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Indeks

Pembangunan Gender mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sementara itu, Predikat Kabupaten Layak Anak menunjukkan komitmen dan keberhasilan daerah dalam memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan kelembagaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diperoleh rata-rata hasil capaian kinerja sasaran sebesar 100,5 % atau kategori predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Indeks Pembangunan Gender	Poin	82.80	81,26	82.80*)	101,90	81,27	43,09
Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	100	Pratama	100
Rata-rata Capaian					**100,5**		

*) Data Tahun 2024

a. Indeks Pembangunan Gender

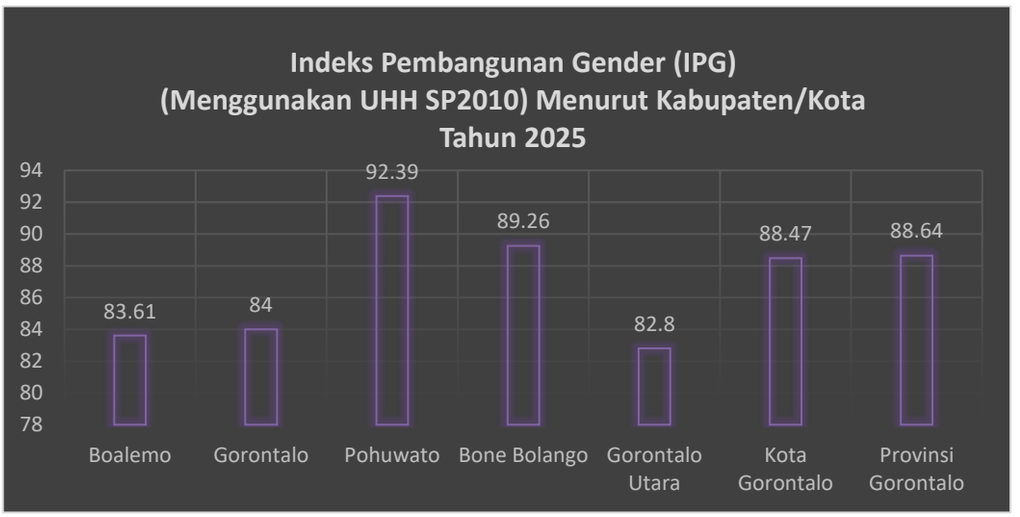
Berdasarkan data terbaru yang tersedia dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Gorontalo Utara untuk tahun 2025 belum dirilis secara spesifik, namun data terakhir yang dapat dijadikan acuan adalah IPG tahun 2024 yakni 82,80.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, IPG tercatat sebesar 82,80, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,43. Kondisi ini mengindikasikan semakin mengecilnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pembangunan, khususnya pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024, capaian IPG di Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar 82,80. Nilai ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di daerah tersebut sudah berada pada kategori cukup baik, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo,

posisinya masih relatif berada pada kelompok menengah ke bawah. Secara komparatif, IPG Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di bawah beberapa daerah dengan capaian lebih tinggi, seperti Kabupaten Pohuwato yang mencapai 92,39, Kabupaten Bone Bolango sebesar 89,26, serta Kota Gorontalo sebesar 88,47. Selain itu, capaian ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Gorontalo yang mencapai 88,64. Namun demikian, IPG Kabupaten Gorontalo Utara relatif tidak terpaut jauh dengan Kabupaten Boalemo sebesar 83,61 dan Kabupaten Gorontalo sebesar 84,00, yang menunjukkan bahwa capaian antar wilayah berada dalam rentang yang cukup berdekatan. Perbedaan capaian IPG antar kabupaten/kota tersebut mencerminkan adanya variasi dalam tingkat kesetaraan gender, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, meskipun capaian IPG Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan kondisi yang cukup baik, masih diperlukan penguatan kebijakan dan program pengarusutamaan gender guna memperkecil kesenjangan dan meningkatkan posisi daerah dibandingkan wilayah lain. Bisa dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.18 Perbandingan IPG Se Provinsi Gorontalo Tahun 2025



Bps Gorontalo Utara Tahun 2025

b. Predikat Kabupaten Layak Anak

Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang perlindungan anak, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak secara terpadu dan berkelanjutan. Pada Tahun 2025, Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung terwujudnya daerah yang ramah anak melalui berbagai kebijakan dan program yang terintegrasi.

Secara umum, capaian KLA di Kabupaten Gorontalo Utara tidak

terlepas dari upaya penguatan kelembagaan, seperti pembentukan Gugus Tugas KLA, pengembangan Forum Anak, serta penyediaan layanan perlindungan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Upaya tersebut juga diperkuat melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan hukum.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dapat digunakan dalam analisis LKIP di Kabupaten Gorontalo Utara:

1. Komitmen dan Kebijakan Pemerintah Daerah
2. Penguatan Kelembagaan KLA
3. Pemenuhan Hak Anak
4. Perlindungan Khusus Anak
5. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha
6. Ketersediaan Data dan Sistem Informasi

Gambar 3.20 Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Gorontalo Utara



Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang menegaskan pentingnya kehadiran layanan terpadu di daerah agar penanganan korban kekerasan dapat dilakukan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

Gambar 3.21 DPPPA Provinsi Dan Pemkab Gorontalo Utara Berkolaborasi Gelar Sosialisasi Pencegahan TPPO Dan Perkawinan Anak, Dirangkaikan Dengan Deklarasi DRPPA Dan Gerak SKS



Melalui kegiatan ini, Pemkab Gorontalo Utara bersama DPPPA Provinsi Gorontalo mempertegas sinergi untuk mewujudkan Gorontalo yang aman, harmonis, dan berkeadilan gender

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis *Meningkatnya Pembangunan untuk Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak*, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Program-program tersebut difokuskan pada penguatan pengarusutamaan gender serta pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Berikut program yang mendukung atas sasaran ini adalah :

Tabel 3.31 Program dan anggaran Sasaran 10 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	58.354.000	58.354.400	100
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	174.934.200	174.302.500	99,64
3.	Program Perlindungan Perempuan	88.917.000	3.790.000	4,26
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	-
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	8.563.040.000	8.492.487.270	99,18
Total		**8.885.245.200**	**8.728.934.170**	**98,24 %**

Tabel 3.32 Tabel Efisiensi sasaran 10

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	• Indeks Pembangunan Gender • Predikat Kabupaten Layak Anak	100,5 %	98,24 %	102,30 %

Berdasarkan hasil perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran pada Sasaran Strategis *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 102,30 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 100,5 persen telah mampu melampaui tingkat penyerapan anggaran yang sebesar 98,24 persen. Capaian efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan telah berjalan secara efektif dan optimal, dengan pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan kinerja sesuai bahkan sedikit melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, sehingga setiap sumber daya yang digunakan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Selain itu, efisiensi yang dicapai juga menunjukkan bahwa strategi intervensi yang dilaksanakan, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, telah berjalan secara tepat sasaran dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Ke depan, capaian efisiensi ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2.11 Sasaran Strategis 11. Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya

Seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 bahwa Pencapaian tujuan ke tiga yakni Tercapainya pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu komponen yang mendukung Indeks Pembangunan manusia adalah sasaran strategisnya tercapainya

masyarakat yang bermoral , beretika, beradab dan berbudaya dengan indikator sasarannya adalah Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam. Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran berada di angka 100,5 % atau dengan kategori Sangat tinggi. Pengukuran kinerja sasaran Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.33 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya

Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	Poin	215	330	2	16,500	300	15,00

Berdasarkan tabel pengukuran capaian sasaran strategis *Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya* di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025, capaian kinerja diukur melalui indikator angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 330 poin, dengan realisasi yang berhasil ditekan hingga 2 poin. Kondisi ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai 215 poin. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 16,500 persen, yang mengindikasikan bahwa tingkat konflik yang terjadi jauh lebih rendah dari batas target yang telah ditetapkan.

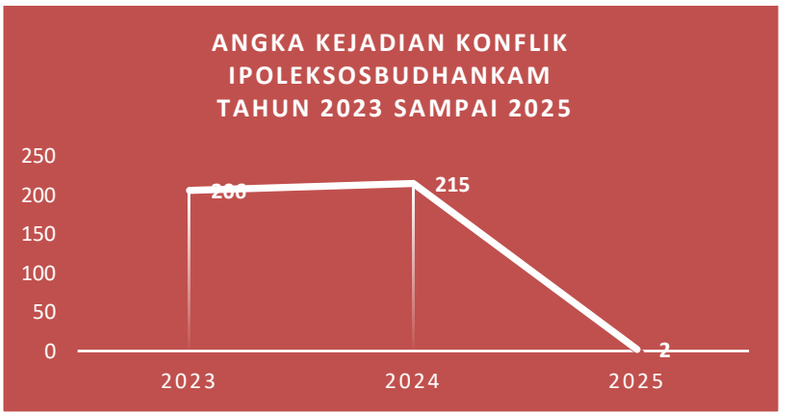
Jika dilihat terhadap target akhir RPD tahun 2026 sebesar 300 poin, capaian tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 15,00, yang berarti kondisi aktual sudah jauh lebih baik dari target jangka menengah yang direncanakan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, serta memperkuat nilai-nilai moral dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis ini mencapai 16,500 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti pembinaan nilai-nilai sosial budaya, penguatan ketahanan masyarakat, serta peningkatan peran tokoh masyarakat dan aparat keamanan, telah

berjalan secara efektif.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dengan kondisi konflik yang sangat rendah, dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara semakin menunjukkan karakter yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya.

Grafik 3.19 angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam dari tahun 2023 sampai 2025



Pencapaian sasaran diatas tidak lepas dari intervensi pemerintah daerah melalui program dan kegiatan . adapun program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34 Program dan Anggaran Sasaran 11.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.635.102	19.720.000	80.05
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	558.860.424	33.860.784	6,06
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	344.796.000	-	-
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	60.000.000	-	-

	Sosial, dan Budaya			
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	9.964.601.988	9.220.838.163	92,53
Total		**10.952.893.514**	**9.274.418.947**	**84,68**

Realisasi dari penyelenggaraan program diatas sebesar Rp. 9.274.418.947 dari Rp. 10.952.893.514 yang telah dianggarkan atau capaian penyerapan anggaran dalam rangka untuk mencapai sasaran Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya sebesar 84,68 %.

Tabel 3.35 Tabel Efisiensi sasaran 11

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam	16,500 %	84,68 %	19,48 %

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran pada Sasaran Strategis *Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya* di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025, diperoleh tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Capaian kinerja tercatat sebesar 16.500 persen, sementara capaian anggaran sebesar 84,68 persen, yang menunjukkan bahwa hasil kinerja yang dicapai jauh melampaui tingkat penyerapan anggaran.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembinaan nilai-nilai moral, etika, sosial, dan budaya masyarakat telah berjalan sangat efektif dan tepat sasaran. Tingginya capaian kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh keberhasilan dalam menekan angka kejadian konflik Ipoleksosbudhankam secara signifikan, sehingga realisasi jauh lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Dengan capaian anggaran yang relatif efisien, namun mampu menghasilkan

kinerja yang sangat tinggi, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pada sasaran strategis ini berada pada kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang tersedia telah memberikan dampak yang optimal dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan nilai yang sangat tinggi, hal ini perlu dimaknai secara proporsional mengingat indikator yang digunakan merupakan indikator negatif, di mana semakin rendah realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik. Oleh karena itu, tingginya persentase capaian kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menekan konflik, bukan peningkatan jumlah kejadian.

Ke depan, capaian efisiensi ini perlu dipertahankan melalui penguatan upaya preventif, peningkatan peran serta masyarakat, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, kondisi masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya dapat terus terwujud secara berkelanjutan.

3.2.12 Sasaran 12. Keuangan Daerah terkelola secara sehat dan akuntable.

Sasaran strategis ke 12 Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntable, ini merupakan salah satu pendukng pencapaian Tujuan ke 4 yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 yaitu Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas, Pencapaian sasaran ini di dukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yaitu : Opini Laporan Keuangan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110 % atau kategori Sangat Tinggi Pengukuran Capaian Sasaran Keuangan Daerah terkelola secara sehat dan akuntable sebagai berikut :

Tabel 3.36 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel

Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Opini laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	4,75	4,75	5,71	120	5,00	114,2
Rata Rata Capaian					110		

a. Opini Laporan Keuangan Daerah

Indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah (LKD) menunjukkan pencapaian yang sangat positif dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel. Pada tahun ini, daerah telah berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ke-12, yang menegaskan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.

Keberhasilan ini mencerminkan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta perencanaan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Prestasi WTP yang berkelanjutan menjadi bukti nyata bahwa keuangan daerah tidak hanya dikelola dengan cermat, tetapi juga mampu memenuhi standar audit eksternal yang ketat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dari Tahun 2019 hingga Tahun 2025 mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan WTP yang kesepuluh kalinya ini mendapat apresiasi penghargaan dari BPK Provinsi Gorontalo.

Gambar 3.22 Kabupaten Gorontalo Utara Kembali Raih Predikat WTP dari BPK Provinsi Gorontalo



Sumber Dokumentasi : Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara , 2025

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kembali meraih prestasi membanggakan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

❖ **Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Perolehan opini WTP tahun 2023 tidak terlepas dari upaya Badan Keuangan Daerah melakukan langkah langkah dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya**:**

1. Melakukan kegiatan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran, hal ini melalui koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang penjabaran APBD serta koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran. Sehingga APBD tepat waktu disampaikan.Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sebagai instrument aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Melakukan kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan kinerja diukur dengan ketepatan waktu pencairan dan penatausahaan keuangan daerah, termasuk pula mengatur ketersediaan dana. System informasi keuangan daerah telah mengakomodir kebutuhan penatausahaan keuangan daerah yang secara online terhubung dengan Bank Kasda. SOP Badan Keuangan selaku BUD telah memanfaatkan untuk penertiban SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terbit tepat waktu sesuai dengan peraturan yang maksimal 2 hari. Selain itu kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dan pengelolaan kas daerah, koodinasi,fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer, pembinaan penatausahaan keuangan Kab/kota.
3. Melakukan kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu dengan melaksanakan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, koordinasi penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi dan penyelesaianan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
4. Melakukan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan dana darurat dan mendesak serta pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota;
5. Melakukan kegiatan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan

kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemikndahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sedangkan penatausahaan barang/asset milik darerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/asset milik daerah daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan.

❖ **Hambatan.**

1. Sistem yang digunakan untuk penyusunan dokumen anggaran menggunakan system dari pusat yang aksesnya masih belum lancer pada jam kerja sehingga proses entri yang dilaksanakan perangkat daerah banyak dilkaukan diluar jam kerja;
2. Proses penyusunan dokumen anggaran melalui tahapan persetujuan DPRD sehingga perlu Upaya untuk sinkronisasi terkait agenda DPRD agar dokumen anggaran tepat waktu;
3. Belum semua perangkat daerah memiliki disiplin tinggi terhadap rencana anggaran kas dan rencana operasional kegiatan;
4. Pengelolaan keuangan daerah kurang tertib;
5. Adanya kebijakan percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dikhawatirkan berdampak pada kualitas penyusunan LKPD;
6. Adanya kebijakan percepatan penyusunan LKPD berdampak pada pengambilan kebijakan cut off transaksi pada akhir tahun sehingga perlu pemahaman bendahara pengeluaran untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan terbayar;
7. Tingkat pemahaman petugas pembuku terhadap standar akuntansi pemerintah belum merata;
8. Masih banyak asset yang secara administrasi belum tertib baik menyangkut status kepemilikan maupun penatausahaannya sehingga masih perlu Upaya lebih untuk mengurangi permasalahan;
9. Perlu adanya peninjauan ulang terkait pengaturan pengadaan barang milik daerah khususnya pada tahapan perencanaan, karena waktu yang berhimpitan dengan penyusunan renja sehingga penelitian terkait usulan pengadaan dari perangkat daerah sangat sulit dilakukan.

❖ **Solusi**

1. Selalu berkoordinasi dengan pusat jika sistem aksesnya kurang lancar;
2. Berkoordinasi dengan Tim Banggar DPRD agar dokumen anggaran tepat waktu;
3. Melakukan pelatihan kepada perangkat daerah tentang penyusunan RAK

dan rencana operasional kegiatan;

4. Melakukan penertiban keuangan daerah;
5. Penyusunan LKPD dijadwalkan lebih awal;
6. Bendahara pengeluaran diberikan pelatihan untuk pengambilan kebijakan cut off transaksi akhir tahun;
7. Memberikan pendampingan terhadap petugas pembuku standar akuntansi;
8. Melakukan pendataan asset yang kepemilikannya belum tertib administrasi;
9. Dibuatkan peraturan terkait pengadaan barang milik daerah.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang sangat positif dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan target RPD sebesar 4,75, realisasi rasio kemandirian mencapai 5,71, meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 4,75.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam memperkuat basis penerimaan asli daerah (PAD), mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hasil capaian ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi dari target, sekaligus menegaskan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Keberhasilan ini menjadi indikator nyata bahwa Kabupaten Gorontalo Utara semakin mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, mendukung tercapainya sasaran strategis keuangan daerah yang sehat, mandiri, dan akuntabel.

❖ **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang memiliki usaha terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah.
2. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Gorontalo Utara atas kesadaran wajib pajak dan restribusi.
3. Pemerintah Daerah Gorontalo Utara melakukan Perbaikan perencanaan dan pengendalian belanja daerah sehingga penggunaan dana lebih tepat sasaran.
4. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga melakukan Koordinasi yang baik dalam pengelolaan dana transfer, hibah, dan bantuan teknis mendukung pemanfaatan pendapatan daerah secara maksimal.

Hasil dari faktor-faktor ini tercermin dalam capaian rasio kemandirian 5,71 pada 2025, lebih tinggi dibandingkan target RPD 4,75 dan realisasi tahun sebelumnya 4,75, menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

❖ **Hambatan**

1. Masih banyak Masyarakat dan Pengusaha yang tidak patuh membayar pajak/restribusi
2. Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap prosedur atau denda pajak dan restribusi tinggi.
3. Data wajib pajak yang tidak akurat membuat lemahnya PAD di Gorontalo Utara.
4. Sektor PAD yang hanya terbatas, dimana hanya bergantung pada pajak dan restribusi dasar seperti pasar, parkir dan restoran, dan pengumutan sampah di rumah warga.
5. Masih kurangnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Gorontalo Utara diakibatkan oleh inflansi, misalnya pengunjung pasara atau wisata sehingga pajak dan restribusi tidak naik.
6. SDM Pengumut pajak /restribusi yang terbatas dan kurang terlatih.

❖ **Solusi**

1. Melakukan Sosialisasi manfaat PAD bagi Pembangunan local seperti jalan, sekolah, dan Kesehatan terhadap Masyarakat yang tidak patuh terhadap pajak dan restribusi misalnya mengundang warga di pertemuan Pembangunan desa untuk menunjukan penggunanaan PAD.
2. Melaukan program diskon atau penghapusan denda bagi penunggak pajak lama.
3. Melakukan perbaikan system administrasi seperti Implementasi Digitalisasi pajak dan restribusi, serta audit untuk memastikan data PAD akurat.
4. Menggali potensi sektor pariwisata, restribusi perikanan dan izin usaha kecil.
5. Pengumutan pajak di produk produk daerah seperti hotel, dan ole oleh khas daerah.

Gambar 3.23 Sosialisasi pemanfaatan jalan dan Perda Retribusi parkir di Kabupaten Gorontalo Utara





Tabel 3.37 Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Pengelolaan Keuangan daerah	1.501.103.680	1.265.027.346	84,27
2.	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	658.009.165	519.436.625	78,94
3.	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	748.545.366	416.905.393	55,70
Total		**2.907.658.211**	**2.201.369.364**	**75,70**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. **2.201.369.364** dari anggaran Rp. **2.907.658.211** dengan capaian 75,70 %.

Tabel 3.38 Tabel Efisiensi sasaran 12

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Keuangan daerah terkelola secara sehat dan akuntabel	• Opini laporan keuangan daerah • Rasio kemandirian keuangan daerah	110 %	75,70 %	68,81 %

Pada tahun 2025, kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel. Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Opini Laporan Keuangan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Tingkat efisiensi mencapai 68,81%, mengindikasikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian kinerja. Efisiensi ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kuantitas pengeluaran, tetapi juga pada kualitas dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

3.2.13. Sasaran Strategis 13. Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik

Sasaran strategis-13 Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik merupakan salah satu pendukung pencapaian Tujuan ke Empat

yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu “Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas”.

Untuk tahun ini Sasaran 13 Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik mendapatkan capaian kinerja yang positif capaian sebesar 180%. Dengan Kategori Sangat Tinggi Pencapaian ini didukung oleh indikator sasaran yaitu Indeks Maturitas SPBE. Berikut ini hasil pengukuran kinerja sasaran 13 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.39 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik

Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Indeks Maturitas SPBE	Poin	2,89	1,75	3,16	180	1,75	180

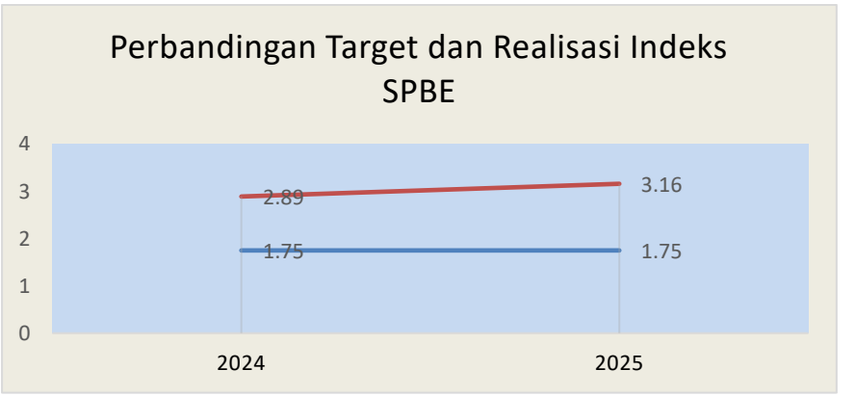
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang mengukur tingkat kematangan dan efektivitas penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah telah mengimplementasikan digitalisasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, manajemen administrasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dengan penerapan SPBE yang optimal, diharapkan proses pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gorontalo Utara tercatat mencapai 3,16 dengan predikat Baik. Meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 1,75, dengan capaian realisasi sebesar 180 % dari target tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, indeks SPBE mengalami kenaikan sebesar 1.41 poin, dari sebelumnya 2,89.

Apabila realisasi indeks SPBE tahun 2025 diukur terhadap target akhir RPD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 1,75, maka capaian tahun ini sudah mencapai 180% dari target tersebut. Namun, secara keseluruhan, tren indeks SPBE sejak tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, dengan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Perbandingan antara target dan realisasi indeks SPBE dari tahun ke

tahun dapat dilihat Grafik 3.20.

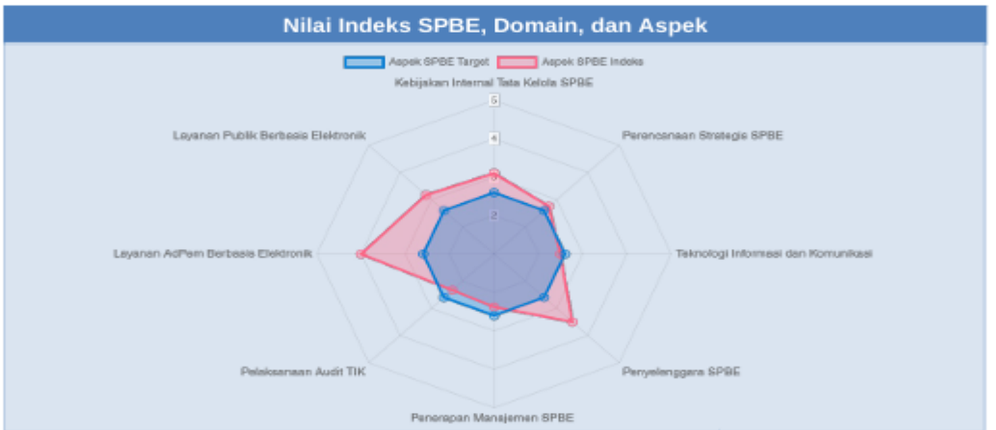
Grafik 3.20 perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2025



Penilaian Indeks SPBE dilakukan pada 4 Domain SPBE dan 8 aspek penilaian. Informasi detail terkait dengan penilaian SPBE dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 3. 24 LHE Indeks SPBE Kabupaten Gorontalo Utara

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA	3,16 (Baik)



Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**3,16**
Domain Kebijakan SPBE	3,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*3,10*
Domain Tata Kelola SPBE	2,80
Perencanaan Strategis SPBE	*2,75*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*2,50*
Penyelenggara SPBE	*3,50*
Domain Manajemen SPBE	2,36
Penerapan Manajemen SPBE	*2,38*
Audit TIK	*2,33*
Domain Layanan SPBE	3,67
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,00*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*3,17*

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE yang tertuang pada Gambar diatas Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan nilai yang cukup baik pada Domian Kebijakan SPBE dan Domain Layanan SPBE. Adapun 2 domain tersisa yaitu domain Tata Kelola SPBE dan domain Manajemen SPBE perlu lebih ditingkatkan kembali.

Upaya – upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan nilai Indeks SPBE adalah Dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPBE dilakukan identfikasi terehadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pra, proses dan paska implementasi. Berdasarkan hasil survei dan analisis penelitian yang dilakukan terhadap beberapa organisasi perangkat daerah di Gorontalo Utara, diperoleh faktor - faktor keberhasilan kritis yaitu : Relasi Antar Organisasi, Enterprise Architecture, Regulasi, Manajemen Perubahan, Data dan Informasi, Aplikasi, Program dan Proyek TI, Sumber Daya Manusia, dan Pengambilan Keputusan.

❖ **Hambatan dan Masalah**

1. Secara umum, penerapan SPBE di Kabupaten Gorontalo Utara, belum maksimal. Hal ini karena beberapa sistem yang berjalan di Kabupaten Gorontalo Utara belum terintegrasi dan tersentralisasi, sehingga diharapkan hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai upaya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang benar-benar terpusat dan saling terkoneksi.
2. Kurangnya SDM yang berkompeten terutama pada posisi auditor TIK sehingga hal ini menyebabkan rendahnya nilai audit TIK pada penilaian SPBE tahun 2025.

❖ **Solusi**

1. Hal - hal yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan pada Kebijakan Pemerintah Daerah lebih berfokus pada seluruh aspek domain kebijakan SPBE, dan yang paling utama adalah Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE.
2. Melakukan peningkatan SDM terutama pada posisi auditor TIK sebagai upaya peningkatan kualitas TIK yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara.

Capaian kinerja strategi Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik dengan indikator Indeks Maturtitas SPBE merupakan salah satu tolak ukur pencapaian indikator kinerja Tujuan ke Empat yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu “Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas”. dicapai melalui Program sebagai berikut:

Tabel 3.40 Program dan anggaran Sasaran 13 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.692.302.700	1.613.171.922	95,32
2.	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	42.500.000	42.168.000	99,22
Total		**3.305.474.622**	**1.655.339.922**	**50,07**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik adalah sebesar Rp. **1.655.339.922** dari anggaran sebesar Rp. 1**3.305.474.622** atau dengan capaian 50,07 %.

Tabel 3.41 Tabel Efisiensi sasaran 13

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks Maturitas SPBE	180 %	50,07 %	359,5 %

Pada tahun 2025, kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan pencapaian yang sangat positif dalam mewujudkan sasaran strategis “Terakselerasinya Transformasi dan Literasi Digital untuk Pelayanan Publik”. Capaian kinerja mencapai 180%, menandakan upaya transformasi digital dan peningkatan literasi masyarakat dalam pelayanan publik berjalan melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini tercatat sebesar 50,07%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara hemat dan terfokus pada prioritas utama. Dengan perhitungan efisiensi sebesar 359,5%, hal ini menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kinerja, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan program.

3.2.14 Sasaran Strategis 14. Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah

Sasaran strategis 14 Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah merupakan salah satu pendukung pencapaian Tujuan ke Empat yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu “Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas”. Sasaran 14 Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah mendapatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,86 %. Dengan Kategori Tinggi Pencapaian ini didukung oleh 2(dua) indikator sasaran yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Maturitas SPIP. Akan tetapi untuk Sasaran ini hanya 1(satu) indikator yang dapat di ukur karena untuk indikator Maturitas SPIP Tahun 2024 belum ada hasil penilaiaanya. Berikut ini hasil pengukuran kinerja sasaran 14 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.42 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah

Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	65,89/B	67	64,14/B	95,73	70	91,62
Maturitas SPIP	Level	2,9	2,9	2,9	100	3,00	96,66
Rata-Rata Capaian					97,86		

a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), merupakan hasil evaluasi terhadap implementasi manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah yang mencakup perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi mampu menjalankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pada tahun 2025, Kabupaten Gorontalo Utara mencatat nilai SAKIP sebesar 64,14, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat

65,89. Meskipun terjadi penurunan, nilai ini tetap menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi meskipun nilai Sakip Kabupaten Gorontalo Utara mengalami penurunan akan tetapi dari hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja abupaten Gorontalo Utara. menunjukkan bahwa nilai sebesar 64,14 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

❖ **Permasalahan yang dihadapi**

1. Ketidak sesuaian antara dokumen perencanaan strategis (RPD, Renstra, dan Renja) dengan implementasi program/kegiatan karena belum dilakukannya reviu dokumen perencanaan dan penyempurnaan pohon kinerja sesuai dengan PerMenPANRB No. 89 Tahun 2021;
2. Masih adanya indicator kinerja utama (IKU) yang belum terukur atau tidak relevan dengan tujuan Pembangunan daerah;
3. Pemahaman perangkat daerah dalam Menyusun perencanaan berbasis kinerja masih kurang;
4. Evaluasi kinerja yang belum berjalan optimal, baik ditingkat perangkat daerah maupun kabupaten secara berkala;
5. Hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas;
6. Alokasi anggaran yang belum berbasis kinerja, sehingga program-program yang tidak berdampak tetap mendapat prioritas;
7. Peningkatan kapasitas pegawai belum dilakukan secara optimal.

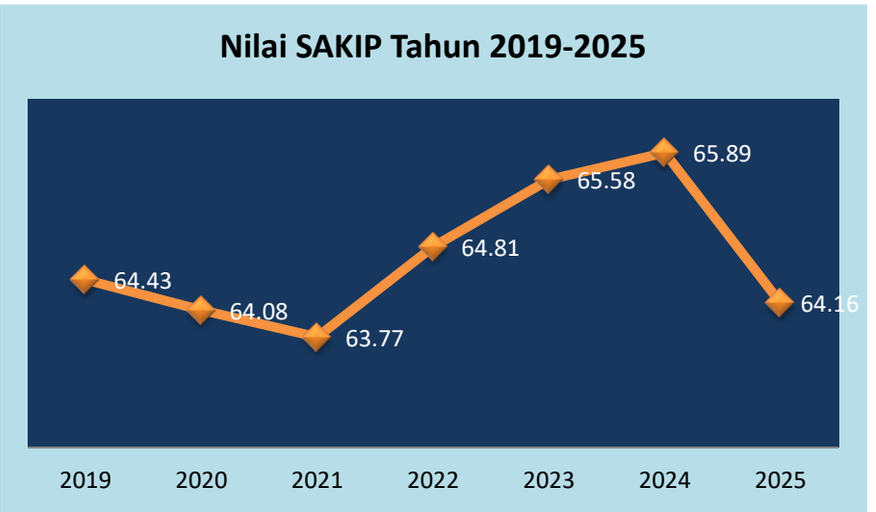
❖ **Solusi**

1. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah dan menyempurnakan pohon kinerja sesuai dengan PermenPANRB No. 89 Tahun 2021;
2. Menyusun indicator kinerja utama (IKU) yang spesifik, terukur, dan relevan dengan visi dan misi daerah. Khususnya pada Tahun 2026 akan ada penyusunan RPJMD yang baru, sehingga akan disesuaikan dengan visi dan misi pimpinan terpilih;
3. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada opd, khususnya tentang penyusunan pohon kinerja;
4. Menerapkan review kinerja secara triwulan guna memastikan pencapaian target;
5. Meberikan sanksi kepada opd yang tidak memenuhi standar akuntabilitas

kinerja yang telah ditetapkan;

6. Mengalokasikan anggaran berdasarkan capaian kinerja, bukan hanya pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, serta menerapkan system evaluasi anggaran.

Grafik 3.21 Nilai SAKIP Kab.Gorontalo Utara Tahun 2020-2025



b. Maturitas SPIP

ada tahun 2025, capaian indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan hasil yang optimal, dengan realisasi sebesar 2,9 atau 100% dari target RPD yang ditetapkan sebesar 2,9. Capaian ini mencerminkan bahwa implementasi SPIP telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Tingkat maturitas SPIP pada level tersebut menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu menerapkan unsur-unsur pengendalian intern secara **cukup memadai**, terutama dalam aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Grafik 3.22 Nilai SPIP Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023-2025



Capaian kinerja strategi Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Maturitas SPIP merupakan salah satu tolak ukur pencapaian indikator kinerja tujuan keempat dalam dokumen RPD Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 yaitu "Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas ". Sasaran Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik dicapai dicapai melalui Program sebagai berikut:

Tabel 3.43 Program dan anggaran Sasaran 13 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	294.289.028.733	101.706.347.377	34,56

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 101.706.347.377 dari anggaran sebesar Rp 101.706.347.377 dengan capaian 34,56 persen.

Tabel 3.44 Tabel Efisiensi sasaran 14

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	• Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Maturitas SPIP	97.97	34,56 %	283

3.2.15 Sasaran Strategis 15. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik

Sasaran strategis 15 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik merupakan salah satu pendukung pencapaian Tujuan ke Empat yan ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu "Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas". Sasaran 15 Meningkatnya kualitas

dan aksesibilitas layanan publik mendapatkan capaian kinerja sebesar 87,59%. Dengan Kategori Tinggi Pencapaian ini didukung oleh indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.. Berikut ini hasil pengukuran kinerja sasaran 15 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.45 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,65	3,95	3,46	87,59	3,95	87,59

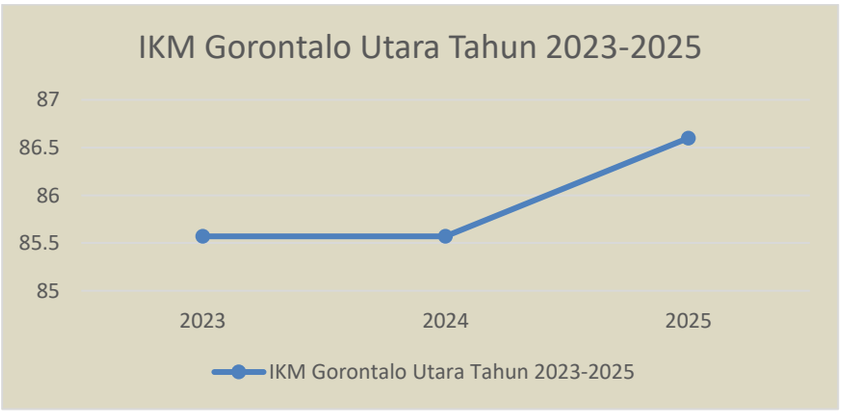
Pada tahun 2025, capaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar 3,46 dari target RPD sebesar 3,95, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada kisaran 87,59%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Hasil tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah merasakan manfaat pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam aspek kemudahan akses layanan, kejelasan prosedur, serta responsivitas petugas. Namun demikian, beberapa aspek pelayanan seperti kecepatan layanan, konsistensi standar pelayanan, serta kenyamanan sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan agar kepuasan masyarakat dapat lebih optimal.

Grafik 3.23 Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Grafik 3.24 IKM Gorontalo Utara Tahun 2023-2025



Pada tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Gorontalo Utara tercatat sebesar 3,46 pada skala 1–4. Nilai tersebut apabila dikonversikan ke dalam skala nasional (25–100) setara dengan ±86,50, yang menunjukkan kategori Baik dalam kualitas pelayanan publik.

Capaian ini mencerminkan bahwa secara umum masyarakat telah merasakan pelayanan publik yang cukup memuaskan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa aspek layanan untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

❖ **Hambatan dan Masalah**

1. Masih minimnya SDM dan pengetahuan Masyarakat dalam hal pemanfaatan teknologi, khususnya dalam pemakaian aplikasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melancarkan aplikasi dimaksud, antara lain kesediaan jaringan internet dan wifi.
3. Harus dipastikan penunjukan admin pengelolah dan penanggungjawab laporan SKM dari masing-masing OPD, sehingga data dan hasil survei senantiasa update. Sebab terkadang karna tidak adanya admin, maka laporan SKM tidak dapat disampaikan oleh OPD tertentu.
4. Masih terdapat OPD yang memberlakukan pengisian survei dengan format lama, yaitu dengan menggunakan form isian yang ditulis langsung oleh Masyarakat. Sehingga agar terintegrasi dengan system, maka admin OPD harus mengupload dan mengolah data tersebut, untuk digabungkan dengan data yang ada dalam aplikasi.

❖ **Solusi**

1. Pengajuan anggaran untuk pembuatan aplikasi SKM yang lebih baik. akan tetapi hal ini masih sulit untuk dapat diwujudkan. Berkenaan dengan darurat efisiensi pemangkasan anggaran.
2. Kami terus mendorong agar seluruh OPD dapat memanfaatkan aplikasi

sederhana survei SKM, agar hanya terdapat 1 data SKM yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Bahwa kedepannya, OPD yang wajib melaksanakan survei SKM, akan merambah sampai ke Puskesmas dan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Capaian kinerja strategi Meningkatnya Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik merupakan salah satu tolak ukur pencapaian indikator kinerja tujuan keempat dalam dokumen RPD Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 yaitu “Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas “. Sasaran Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik dicapai dicapai melalui Program sebagai berikut:

Tabel 3.46 Program dan anggaran Sasaran 15 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Pendaftaran Penduduk	234.584.137	227.033.031	97
2.	Program Pencatatan Sipil	13.446.300	13.325.000	99
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4. 427.326	2.850.000	64
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	-
5.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.674.999.952	110.501.700	6,60
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	23.719.640	23.681.500	99,84
7.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	6.941.860.800	6.159.422.036	88,73
8.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.440.000	46.359.000	99,83
9.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-
	Program Penyelenggaraan	7.800.000	7.170.000	91,92

	Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
10.	Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.782.000	12.422.000	57,03
12.	Program Pengelolaan Arsip	-	-	-
Total		**10.121.178.840**	**8.969.060.157**	**88,61**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp **8.969.060.157** dari anggaran sebesar Rp **10.121.178.840** dengan capaian 88,61 persen.

Tabel 3.47 Tabel Efisiensi sasaran 15

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,59%	88,61 %	283 %

Pada tahun 2025, sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Publik” menunjukkan kinerja yang cukup optimal dengan capaian kinerja sebesar 87,59% dan realisasi anggaran sebesar 88,61%. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 98,85%, yang mencerminkan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara proporsional dan selaras dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Meskipun capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, penggunaan anggaran yang hampir sebanding dengan hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan terkendali. Hal ini juga mengindikasikan adanya konsistensi antara perencanaan dan implementasi kegiatan dalam meningkatkan kualitas serta aksesibilitas layanan publik.

Ke depan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas layanan melalui penguatan inovasi pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sarana dan prasarana, sehingga capaian kinerja dapat lebih ditingkatkan dengan tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran.

3.2.16 Sasaran Strategis 16. Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur

Sasaran strategis 16 Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur merupakan salah satu pendukung pencapaian Tujuan ke Empat yan ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu “Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas”. Sasaran 16 Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur mendapatkan capaian kinerja sebesar 224 %. Dengan Kategori Sangat Tinggi Pencapaian ini didukung oleh indikator sasaran yaitu Indeks Profesionalitas ASN.. Berikut ini hasil pengukuran kinerja sasaran 16 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.48 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya daya, profesion alisme, dan iklim kerja aparatur

Meningkatnya daya, profesion alisme, dan iklim kerja aparatur							
Indikator	**Satuan**	**Realisasi 2024**	**Tahun 2025**			**Target Akhir RPD (2026)**	**Capaian Kinerja 2025 terhadap RPD**
			Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**		
Indeks Profesionalitas ASN	Poin	77,70	36,1	80,65	223	36,20	222

Pada tahun 2025, capaian indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 80,65, jauh melampaui target RPD yang ditetapkan sebesar 36,1. Capaian ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 77,70, sehingga mencerminkan adanya perbaikan kualitas dan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

Peningkatan ini didukung oleh berbagai upaya pemerintah daerah, antara lain melalui peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan, penataan manajemen kepegawaian, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kepegawaian turut mendorong peningkatan efisiensi dan akuntabilitas kinerja ASN.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan yang umum dihadapi oleh Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025, antara lain:

1. Masih terdapat ASN yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan, serta ketimpangan kualitas antar perangkat daerah dan wilayah

kecamatan.

2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, maupun sertifikasi ASN belum dapat menjangkau seluruh pegawai secara merata karena keterbatasan fiskal daerah.
3. Proses promosi, mutasi, dan pengisian jabatan belum sepenuhnya berbasis pada kompetensi dan kinerja, sehingga berdampak pada belum maksimalnya profesionalitas ASN.
4. Pengelolaan data ASN masih belum sepenuhnya berbasis sistem yang terintegrasi, sehingga mempengaruhi akurasi data dan pengambilan keputusan manajerial.
5. Letak geografis dan keterbatasan fasilitas menyebabkan ASN belum optimal dalam mengakses inovasi, pelatihan berbasis digital, maupun pengembangan kompetensiberbasis teknologi.

❖ **Solusi Permasalahan Indeks Profesional ASN**

1. Menyusun peta kebutuhan kompetensi (training need analysis) berbasis jabatan.
2. Melaksanakan diklat, bimtek, dan pelatihan berbasis online (e-learning) agar lebih menjangkau seluruh ASN.
3. Memprioritaskan anggaran pada program peningkatan apasitas ASN yang berdampak langsung terhadap kinerja
4. Mendorong kerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah maupun non-pemerintah untuk efisiensi biaya
5. Meningkatkan transparansi dalam promosi, mutasi, dan rotasi jabatan berbasis kompetensi dan kinerja.
6. Memperkuat peran BKPP dan tim penilai kinerja dalam proses manajemen ASN.
7. Mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan berbasis digital, webinar, dan platform pembelajaran nasional.

Capaian kinerja strategi Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur merupakan salah satu tolak ukur pencapaian indikator kinerja tujuan keempat dalam dokumen RPD Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 yaitu “Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas “. Sasaran Meningkatnya daya, profesionalisme, dan iklim kerja aparatur dicapai dicapai melalui Program sebagai berikut:

Tabel 3.49 Program dan anggaran Sasaran 16 Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Kepegawaian daerah	30.300.000	26.355.400	86,98
2.	Program Pengembangan Sumber Daya manusia	44.593.500	36.360.000	81.54
Total		**74.893.500**	**62.715.400**	**83,73**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp **62.715.400** dari anggaran sebesar Rp 74.893.500 dengan capaian **83,73** persen.

Tabel 3.50 Tabel Efisiensi sasaran 16

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Meningkatnya daya, profesion alisme, dan iklim kerja aparatur	Indeks profesionalitas ASN	223 %	83,73 %	283 %

Pada tahun 2025, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan capaian yang sangat optimal, dengan capaian kinerja sebesar 223% dan realisasi anggaran sebesar 83,73%. Kondisi ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 266,34%, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja yang jauh melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif terkendali.

Tingginya tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan profesionalitas ASN telah dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan berorientasi hasil, sehingga setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kualitas ASN.

Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem merit, pemerataan pengembangan kompetensi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan ASN, sehingga profesionalitas ASN dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

B A B IV
P E N U T U P

Tujuan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gorontalo Utara adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik terkait penggunaan anggaran dan pencapaian target pembangunan.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja menjadi penting sebagai bahan refleksi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dijalankan. Di samping itu, pencapaian tersebut juga menjadi indikator untuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum, kinerja organisasi di Kabupaten Gorontalo Utara telah menunjukkan hasil yang signifikan. Dari 26 indikator sasaran yang diukur, sebanyak 17 indikator berhasil mencapai capaian Sangat Tinggi, 3 indikator dengan capaian Tinggi, 1 indikator dengan capaian Sedang, 1 indikator dengan capaian Rendah, dan 2 indikator dengan capaian Sangat Rendah. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar indikator telah mencapai hasil yang optimal, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai standar yang lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai pencapaian kinerja sasaran didukung dengan anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **442.950.789.556** Dari total anggaran tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp **235.800.774.638** atau sebesar **53,23**

%, menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam pemanfaatan anggaran yang ada.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa langkah strategis akan dilakukan. Pertama, perhatian khusus akan diberikan pada indikator dengan capaian Rendah dan Sangat Rendah, dengan merancang program yang lebih terfokus, efisien, dan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kedua, optimalisasi anggaran dan sumber daya akan terus diperkuat untuk memastikan setiap program prioritas mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan transparan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi akan menjadi prioritas, disertai dengan penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas. Terakhir, evaluasi dan penajaman program kerja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap kegiatan tetap relevan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.